Katalog: 9101009.72

Analisis Isu Terkini

Provinsi Sulawesi Tengah

2024

Volume 4, 2024

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

https://sulteng.bps.go.id

Katalog: 9101009.72

Analisis Isu Terkini

Provinsi Sulawesi Tengah

2024

Volume 4, 2024

https://sulteng.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Analisis Isu Terkini
Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Volume 4, 2024

Katalog : 9101009.72
Nomor Publikasi : 72000.24013
Ukuran Buku : 17,6 × 25 cm
Jumlah Halaman : xiv+67 halaman

Penyusun Naskah : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Penyunting : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pembuat Kover : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Penerbit : ©BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber Ilustrasi : *new.express.adobe.com*

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

https://sulteng.bps.go.id

Tim Penyusun

Analisis Isu Terkini
Provinsi Sulawesi Tengah 2024
Volume 4, 2024

Pengarah
Simon Sapary

Penanggung Jawab
Ananto Yanuar

Penyunting
Ananto Yanuar

Penulis Naskah dan Pengolah Data
Aditya Saputra
Afifah Fakhrunnisaa'

Penata Letak
Yudha Subakti

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

Kata Pengantar

Analisis Isu Terkini Sulawesi Tengah merupakan publikasi yang menyajikan analisis hasil Sensus/Survei BPS yang dilengkapi dengan berbagai data pendukung terkini. Setiap tahun, publikasi ini akan terus mendalami isu-isu penting yang menjadi perhatian pemerintah, dengan menyandingkan berbagai fenomena, data, atau fakta dari berbagai sudut pandang supaya memperkaya analisisnya.

Terdapat 2 (dua) tema dalam Analisis Isu Terkini Sulawesi Tengah Tahun 2024. Tema I membahas pembangunan ekonomi berkelanjutan sektor perikanan dan Tema II membahas pembangunan ekonomi berkelanjutan subsektor tanaman pangan (padi/beras). Kedua tema tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang menjelaskan atau melengkapi pembahasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terkait penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, destinasi pariwisata, sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Sementara tema kedua akan terkait pada ketahanan pangan dan mendorong pertanian berkelanjutan (peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian, dan pendapatan pedesaan), memberdayakan petani kecil, dan mengakhiri kemiskinan pedesaan

Ketersediaan publikasi kiranya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna data, utamanya dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kami menyadari analisis dari publikasi masih jauh dari yang diharapkan, ini menjadi ikhtiar kami untuk terus melengkapi dan mempertajam analisis pada kesempatan berikutnya. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga bermanfaat.

https://sulteng.bps.go.id

Palu, Juni 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah

Simon Sapary

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

Daftar Isi

Analisis Isu Terkini
Provinsi Sulawesi Tengah 2024
Volume 4, 2024

		Halaman
Kata Pengantar		**v**
Daftar Isi		**vii**
Daftar Tabel		**ix**
Daftar Gambar		**xi**
1.	**Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Perikanan**	**1**
A.	Agenda Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Topik Nomor 14 "*Life Below Water*"	3
B.	Gambaran Potensi Kelautan di Provinsi Sulawesi Tengah	5
C.	Melestarikan Sumber Daya Laut	20
D.	Kesimpulan	26
E.	Daftar Pustaka	27
2.	**Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Perikanan**	**29**
A.	Agenda Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Pertanian	31
B.	Gambaran Produksi Padi	32
C.	Ketersediaan dan Konsumsi Beras	44
D.	Pemenuhan Kebutuhan Beras Antar Wilayah	49
E.	Fenomena Terkait Sektor Pertanian	56
F.	Kesimpulan	65
G.	Daftar Pustaka	66

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

Daftar Tabel

Tabel		Halaman
1.1	Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (ton), 2018—2023	12
1.2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (ribu US$), 2018—2023	12
1.3	Nilai Produksi Perikanan Tangkap per Provinsi di Pulau Sulawesi (triliun rupiah), 2018—2022	12
1.4	Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022	14
1.5	Volume dan Nilai Produksi Garam Tambak Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2019—2022	19
2.1	Jumlah Usaha Penggilingan Padi Menurut Skala Penggilingan dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA), 2020	48
2.2	Daftar Irigasi Permukaan di Provinsi Sulawesi Tengah	59
2.3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/kota dan Sektor Bekerja, 2023	63

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
1.1	Data Administrasi Panjang Garis Pantai yang Tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (km), 2022	12
1.2	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	7
1.3	Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (persen), 2019—2023	8
1.4	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian dan Subsektor Perikanan terhadap PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (persen), 2023	9
1.5	Perbandingan PDRB Perikanan ADHB dan ADHK Provinsi Sulawesi Tengah (triliun rupiah), 2019—2023	10
1.6	Laju Pertumbuhan Subsektor Perikanan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (persen), 2021—2023	11
1.7	Volume Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Sulawesi Tengah (ribu ton), 2018—2022	13
1.8	Angka Konsumsi Ikan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (kg/kapita/tahun), 2019—2022	15
1.9	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Subsektor Perikanan Menurut Kabupaten/Kota dan di Provinsi Sulawesi Tengah (unit), 2023	16
1.10	Jumah Kapal Motor Perikanan Laut menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (unit), 2019—2022	17
1.11	Realisasi Investasi PMA/PMDN sektor Perikanan (juta rupiah), 2020—2023	18
1.12	Sebaran Desa/Kelurahan yang Berbatasan Langsung dengan Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	21
1.13	Sebaran Desa/Kelurahan Tepi Laut yang mempunyai Tanaman Mangrove di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	22
1.14	Sebaran Desa/Kelurahan Tepi Laut Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Mayoritas Keluarga Buang Sampah di Sungai/Saluran Irigasi/Danau/laut, 2021	23
1.15	Jumlah Desa/Kelurahan Tepi Laut yang memiliki Tanaman Mangrove, Wisata Bahari, dan Tempat Pembuangan Sampah di Sungai/Saluran	24

https://sulteng.bps.go.id

	Irigasi/Danau/Laut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	
1.16	Sebaran Desa/Kelurahan Tepi Laut yang memiliki Wisata Bahari di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	25
2.1	Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	33
2.2	Distribusi ADHB Tiga Sektor Terbesar di Sulawesi Tengah (persen), 2016—2023	35
2.3	Distribusi Penduduk Bekerja di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Pertambangan dan Penggalian Provinsi Sulawesi Tengah (persen), 2016—2023	36
2.4	Produksi Padi Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (ton), 2018—2023	37
2.5	*Share* Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah (ton), 2016—2023	38
2.6	Luas Panen Padi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (hektar), 2023	39
2.7	Produksi Padi dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2018—2023	40
2.8	Produksi Padi Provinsi Sulawesi Tengah Bulanan (GKG/ton), 2022—2024	41
2.9	Jumlah Petani Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Subsektor Tanaman Pangan, 2023	44
2.10	Produksi Beras di Sulawesi Tengah Januari—Desember (ton), 2023	45
2.11	Produksi Beras Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (ton), 2023	46
2.12	Konsumsi Beras Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (ton), 2023	49
2.13	Surplus dan Defisit Beras Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (ton), 2023	50
2.14	Perkiraan Produksi dan Konsumsi Beras Sulawesi Tengah 2020—2051	52
2.15	Surplus-Defisit Beras Sulawesi Tengah per Bulan (ton), Tahun 2023	54
2.16	Andil Inflasi Beras Bulanan Sulawesi Tengah (persen), 2023	56
2.17	Rata-Rata Upah/Gaji Indonesia (rupiah), 2018—2024	61

https://sulteng.bps.go.id

2.18	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan utama (3 Terbesar) Provinsi Sulawesi Tengah (Februari), 2022—2024	62
2.19	Posisi Pinjaman yang Diberikan Pada Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (juta Rp), 2018—2023	64
2.20	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Sulawesi Tengah, 2021—2023	64

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

1 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Perikanan

A. Agenda Pembangunan Berkelanjutan Topik No. 14 "*Life Below Water*"

B. Gambaran Potensi Kelautan di Provinsi Sulawesi Tengah

C. Melestarikan Sumber Daya Laut

D. Kesimpulan

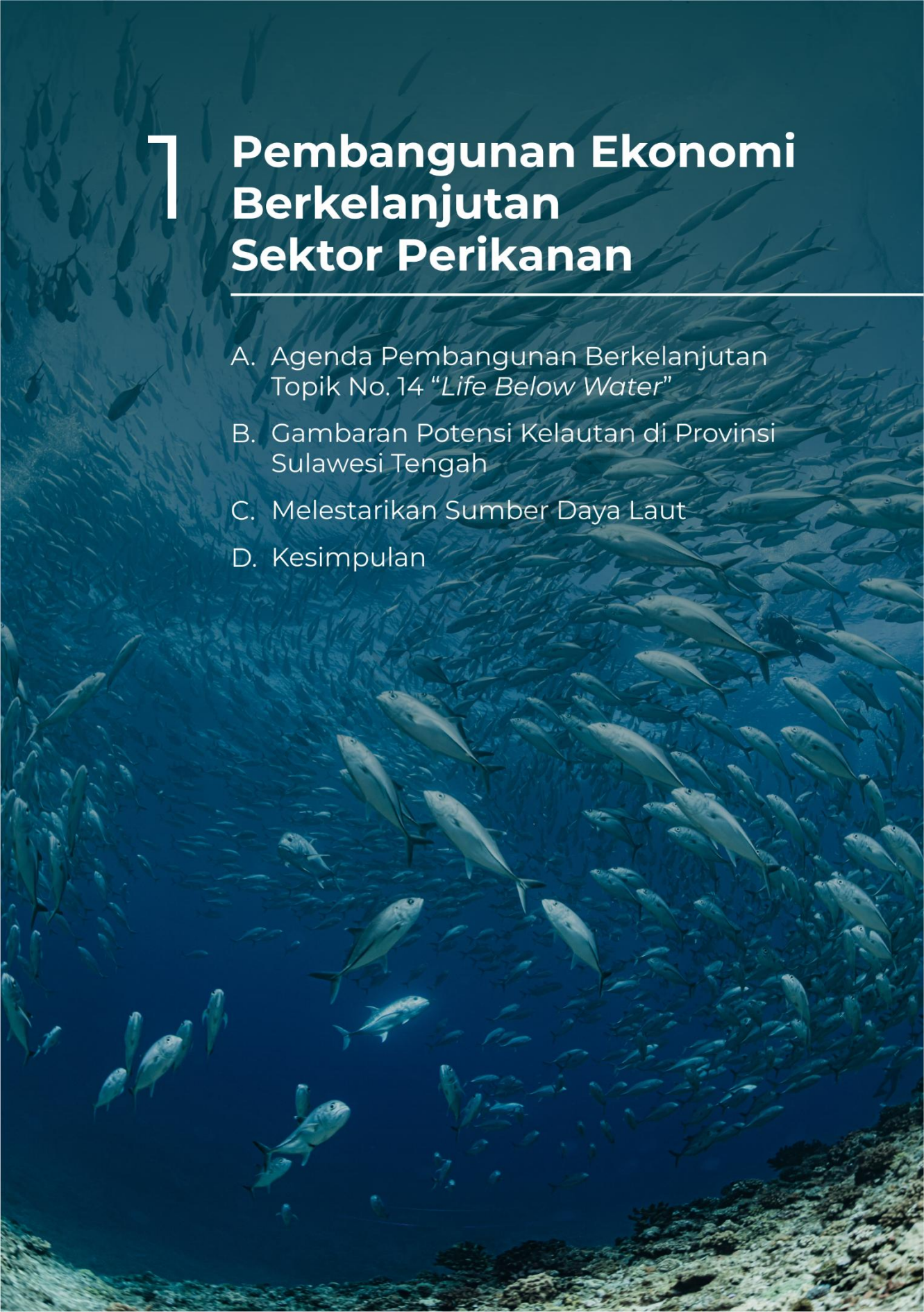

https://sulteng.bps.go.id

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Perikanan

A. Agenda Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Topik Nomor 14 "*Life Below Water*"

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia sepakat untuk mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). SDGs adalah serangkaian tujuan yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Negara-negara ini berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini pada tahun 2030. Kesepakatan tersebut dijabarkan dalam 17 *goal*/tujuan dengan mengedepankan tiga dimensi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan.

Komitmen Indonesia dalam implementasi TPB/SDGs menimbulkan urgensi akan ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Terlebih lagi, tahun 2030 sudah didepan mata, diperlukan akselerasi dalam upaya mencapai target yang disepakati. Namun upaya penyediaan data capaian indikator TPB/SDGs dari Badan Pusat Statistik (BPS) masih menghadapi berbagai tantangan terutama terkait keterbatasan penyediaan data indikator TPB/SDGs pada level provinsi/kab/kota. Oleh karenanya diperlukan kajian dan eksplorasi pemanfaatan sumber data baru seperti, *big data* dan pengembangan model. Sekaligus diperlukan komitmen bersama untuk pemanfaatan sains teknologi untuk memenuhi ketersediaan data.

Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data juga terus mendorong upaya penguatan penyediaan data SDGs melalui kegiatan pembinaan statistik sektoral kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengawal kualitas data statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI).

https://sulteng.bps.go.id

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Pada kesempatan kali ini pembahasan SDGs akan difokuskan pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 14 (SDGs 14) berjudul "*Life Below Water*" atau "Kehidupan Bawah Air". Yang mana poinnya bertujuan untuk melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan dan target SDGs 14 sangat selaras dengan prinsip-prinsip **Ekonomi Biru**, yang menekankan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan, destinasi pariwisata, energi terbarukan dari laut sambil menjaga kesehatan ekosistem laut (sdgs.un.org).

Lautan dan wilayah pesisir merupakan komponen ekosistem bumi yang terintegrasi dan sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Sumber daya ini menutupi lebih dari dua pertiga permukaan bumi dan mengandung 97% air di planet ini. Laut berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dengan menciptakan mata pencaharian berkelanjutan dan pekerjaan yang layak. Banyak orang bergantung pada sumber daya laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. Selain itu, lautan sangat penting bagi ketahanan pangan global dan kesehatan manusia. Lautan juga merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang sangat besar. Kesejahteraan manusia tidak dapat tercapai tanpa perlindungan dan konservasi ekosistem bumi. Untuk menjaga kualitas kehidupan yang diberikan oleh lautan kepada umat manusia, sekaligus menjaga keutuhan ekosistemnya, diperlukan perubahan dalam cara manusia memandang, mengelola, dan memanfaatkan lautan, laut, dan sumber daya kelautan.

Berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan di atas, dipandang perlu mencermati upaya dan capaian Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Perikanan pada level regional khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bahan evaluasi sekaligus perencanaan pada masa mendatang.

https://sulteng.bps.go.id

B. Gambaran Potensi Kelautan di Provinsi Sulawesi Tengah

Ekonomi biru (*blue economy*) adalah ekonomi laut berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dengan tetap memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka panjang (World Bank & UN DESA, 2017). Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya laut dan pelestarian lingkungan laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Salah satu pilar utama dari ekonomi biru adalah ekonomi laut yang berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengelolaan sumber daya laut secara bijaksana, upaya perlindungan lingkungan laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. Menurut Olteanu & Stinga (2019), untuk memiliki ekonomi biru yang berkelanjutan, setiap negara harus menemukan cara terbaik untuk menyeimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penggunaan sumber daya maritim secara optimal, sekaligus memastikan manfaat maksimal bagi lingkungan.

Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan secara internasional diakui sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada. Garis pantai yang panjang ini mencerminkan keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Di dalam negeri ada beberapa provinsi yang memiliki garis pantai yang cukup panjang diantaranya adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah termasuk lima provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia.

https://sulteng.bps.go.id

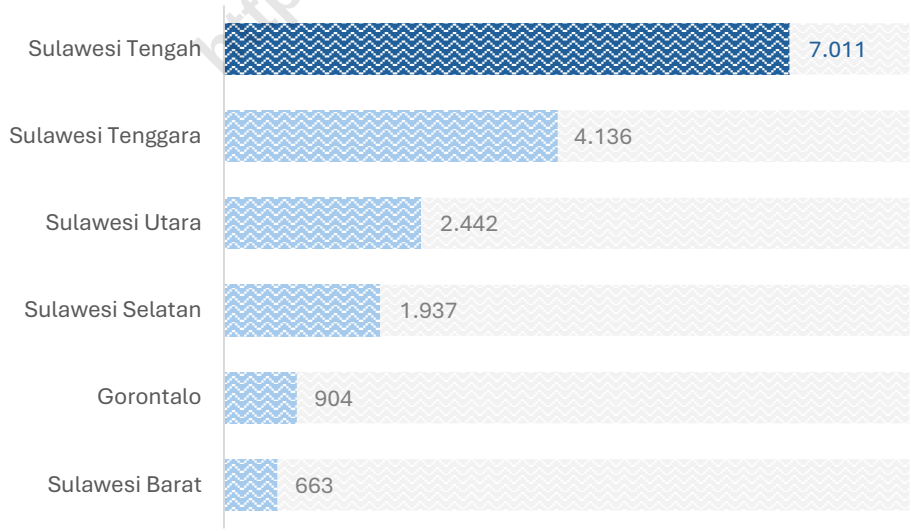

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Gambar 1.1 Data Administrasi Panjang Garis Pantai yang Tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (km), 2022

Jika diperhatikan dengan kacamata yang lebih spesifik di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 6 provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki potensi laut yang sangat besar. Berdasarkan Data Administrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP, 2022), bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki panjang garis pantai terpanjang dibandingkan provinsi lainnya yakni tercatat lebih dari 7 ribu km (Gambar 1.1). Selain itu, Sulawesi Tengah adalah satu-satunya provinsi di Kepulauan Sulawesi yang mempunyai tiga perairan sekaligus, dimana tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lainnya di Kepulauan Sulawesi. Tiga perairan tersebut yaitu Teluk Tomini, Teluk Tolo dan Selat Makassar/Laut Sulawesi (Gambar 1.2). Jika dipandang dari keberadaan 3 wilayah perairan tersebut maka Provinsi Sulawesi Tengah termasuk daerah yang berpotensi mengandalkan sumber daya hasil perikanan sebagai aset pendapatan daerah.

https://sulteng.bps.go.id

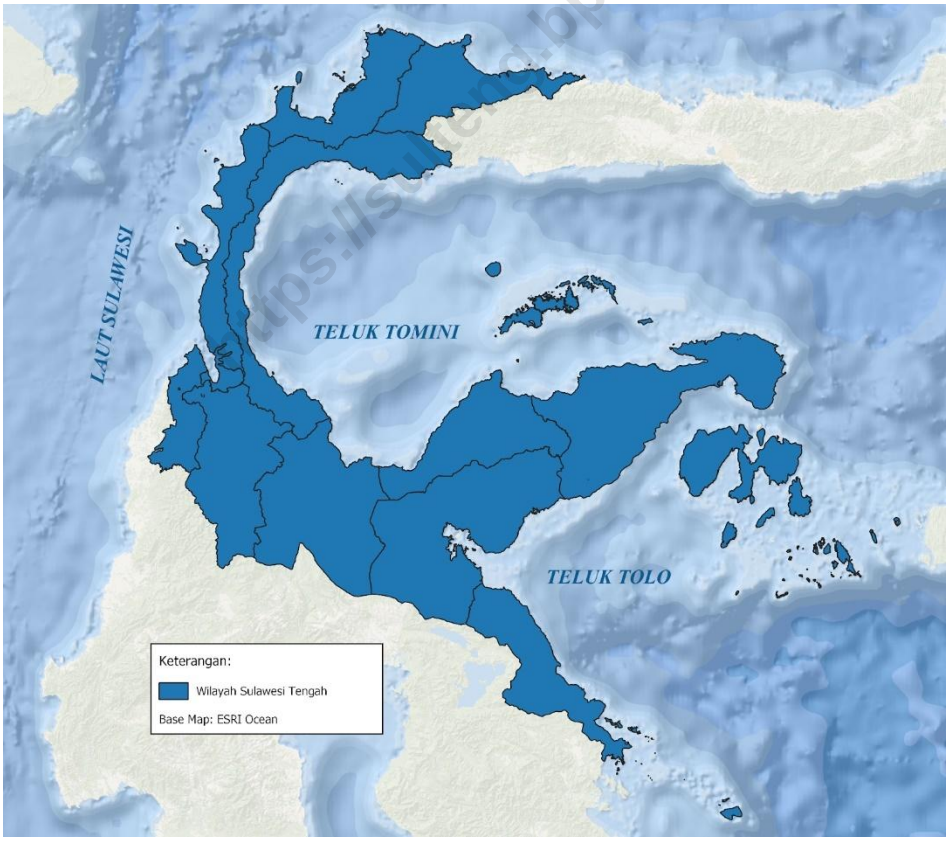

Sumber: ESRI Ocean (diolah)

Gambar 1.2 Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Ironisnya ekonomi laut belum sepenuhnya berperan nyata dalam perekonomian Indonesia. Sepanjang tahun 2023, subsektor perikanan hanya memberikan kontribusi sekitar 3 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Sulawesi Tengah juga 'setali tiga uang', kontribusi subsektor perikanan yang pernah berada pada angka 5,27 persen pada tahun 2019 terus mengalami kemerosotan hingga mencapai 3,06 persen kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2023. Berbeda dengan saudara sepulaunya, provinsi-provinsi di pulau Sulawesi memiliki kontribusi subsektor perikanan yang lebih besar yaitu di kisaran 7—11 persen terhadap total PDRB-nya.

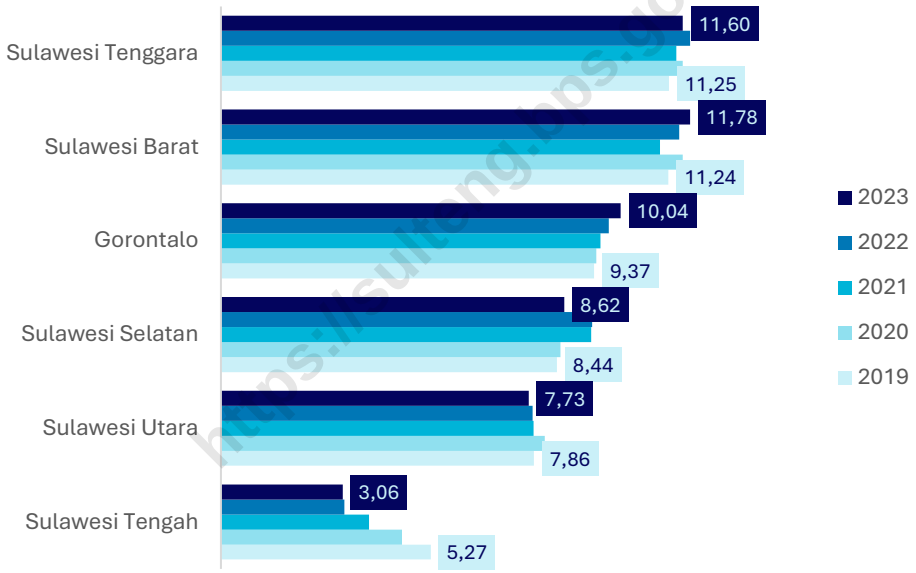

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: BPS

Gambar 1.3 Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Mnurut Provinsi di Pulau Sulawesi (persen), 2019—2023

Sulawesi Tengah memang berbeda, sejak satu dekade terakhir invasi sektor pertambangan dan industri pengolahan mengambil alih dan mendominasi perekonomian di Tanah Kaili. Sulawesi Tengah menjadi perhatian dunia karena merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Dimana investor berdatangan dan mengolah nikel dan produk turunannya, antara lain untuk bahan baku baterai. Dampaknya perekonomian sektor pertambangan dan industri pengolahan melejit sangat cepat dan menenggelamkan sektor lainnya, bukan berarti sektor perikanan secara

volume atau nilai menjadi turun drastis, namun sektor pertambangan dan industri pengolahan yang tumbuh fantastis.

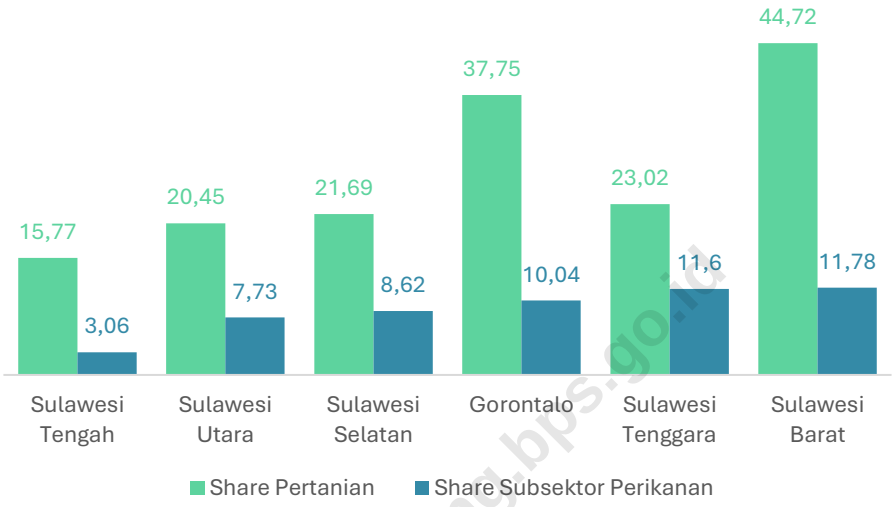

Sumber: BPS

Gambar 1.4 Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian dan Subsektor Perikanan terhadap PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (persen), 2023

https://sulteng.bps.go.id

Jika diperhatikan lebih mendalam ada catatan yang juga perlu menjadi perhatian, yaitu kontribusi subsektor perikanan di Sulawesi Tengah yang hanya seperlima terhadap kontribusi sektor pertanian secara total yang mencapai 15,77 persen. Sedangkan kontribusi subsektor perikanan di provinsi lain misalnya Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari setengah dari total *share* sektor pertanian atau sekitar dari 11,6 persen dari 23,02 persen. Artinya, pemanfaatan bidang perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Tengah masih mungkin diberdayakan secara optimal.

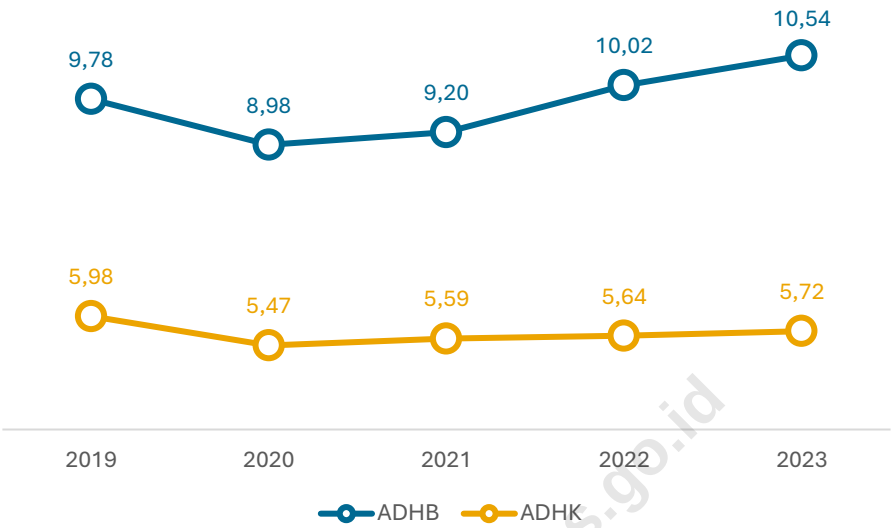

Sumber: BPS

Gambar 1.5 Perbandingan PDRB Perikanan ADHB dan ADHK Provinsi Sulawesi Tengah, (triliun rupiah), 2019—2023

https://sulteng.bps.go.id

Gambar 1.5 menjelaskan pergerakan PDRB Sektor Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Sulawesi Tengah yang belum sepenuhnya pulih pasca gempa 2018 atau *Covid-19*. PDRB ADHK adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam periode tertentu. Penggunaan harga konstan berarti bahwa nilai produksi dinyatakan dalam harga pada tahun dasar tertentu, sehingga efek dari perubahan harga (inflasi atau deflasi) dihilangkan. Dengan demikian, perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencerminkan perubahan volume produksi secara lebih akurat tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Di samping itu, PDRB ADHB yang dinilai dengan harga yang berlaku, sehingga setiap kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) akan tercermin dalam peningkatan PDRB ADHB. Jika terjadi inflasi, PDRB ADHB akan meningkat meskipun volume produksi tetap sama, karena barang dan jasa dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Jadi sekali lagi PDRB perikanan atas dasar harga konstan pada tahun 2023 yang sebesar 5,72 triliun di Sulawesi Tengah menunjukkan adanya peningkatan produksi perikanan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum sepenuhnya pulih jika dibandingkan pada periode sebelum gempa

2018 atau *Covid-19*. Sementara PDRB perikanan atas dasar harga berlaku yang relatif terus meningkat dan nilainya mencapai 10,54 triliun pada tahun 2023 menggambarkan selain peningkatan produksi juga adanya perubahan harga produk perikanan yang cukup signifikan setiap tahun.

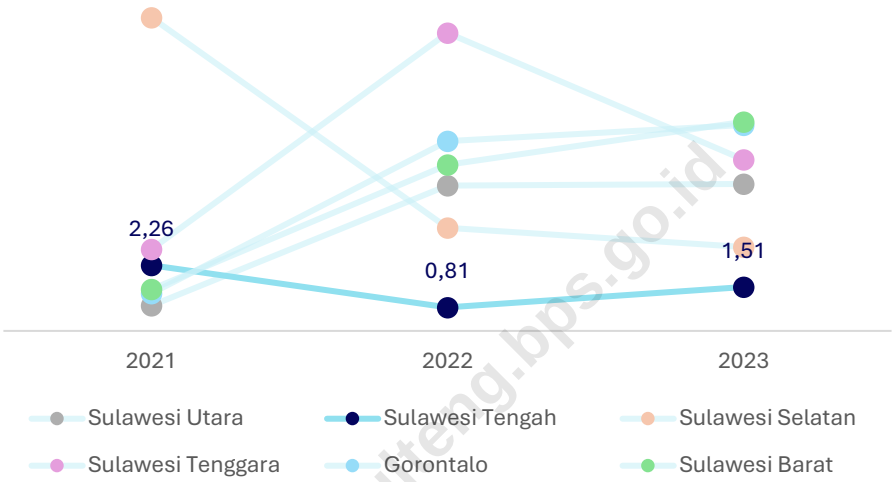

Sumber: BPS

Gambar 1.6 Laju Pertumbuhan Subsektor Perikanan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (persen), 2021—2023

https://sulteng.bps.go.id

Berdasarkan Gambar 1.6, laju pertumbuhan subsektor perikanan di Sulawesi Tengah selama tiga tahun terakhir terjaga pada angka di bawah tiga persen, atau relatif lebih rendah jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak cukup untuk secara signifikan meningkatkan pendapatan per kapita dan dapat memberikan dampak negatif pada daya beli masyarakat, khususnya daya beli penduduk yang bekerja di sektor perikanan.

Tabel 1.1 Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (Ton), 2018—2023

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Selatan	121.904	140.547	145.058	165.306	173.651	131.853
Sulawesi Utara	22.621	25.013	24.140	20.046	22.335	18.076
Sulawesi Tenggara	6.475	3.954	4.816	5.130	4.310	5.155
Sulawesi Tengah	5.815	3.493	1.355	2.552	1.010	1.165
Sulawesi Barat	188	136	28	21	24	17
Gorontalo	131	145	83	32	33	7

Catatan: *Angka sementara hingga bulan September 2023
Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan

Tabel 1.2 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (ribu US$), 2018—2023

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Selatan	300.440	350.776	343.794	430.826	611.757	357.770
Sulawesi Utara	133.861	146.368	129.105	119.670	158.174	112.467
Sulawesi Tenggara	35.726	20.425	21.739	33.388	36.911	30.114
Sulawesi Tengah	13.778	9.829	3.373	4.487	1.990	3.015
Gorontalo	1.299	616	424	312	296	65
Sulawesi Barat	224	294	37	18	12	8

Catatan: *Angka sementara hingga bulan September 2023
Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan

Tabel 1.3 Nilai Produksi Perikanan Tangkap per Provinsi di Pulau Sulawesi (triliun rupiah), 2018—2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Selatan	8,75	9,01	9,73	12,18	12,79
Sulawesi Utara	16,26	8,47	8,92	9,40	9,85
Sulawesi Tenggara	6,30	5,88	6,75	7,51	7,27
Sulawesi Tengah	4,51	3,76	3,67	3,80	5,13
Gorontalo	5,59	3,56	2,69	3,54	3,97
Sulawesi Barat	2,07	1,84	1,60	2,03	1,97
Pulau Sulawesi	**43,50**	**32,52**	**33,37**	**38,46**	**40,98**

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan

https://sulteng.bps.go.id

Fakta dari tabel-tabel di atas menjelaskan perdagangan sektor perikanan pada kancah internasional atau ekspor perikanan dari provinsi Sulawesi Tengah keluar negeri. Pada tahun 2022, volume ekspor hasil perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 1.010 ton atau senilai US$1,99 juta. Volume ekspor ini turun signifikan 85,55 persen dibanding kondisi lima tahun sebelumnya yakni tahun 2018 yang sebesar 5.815 ton atau senilai US$13,78 juta. Perdagangan produk perikanan di kawasan Sulawesi masih di dominasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada tahun 2022 nilai ekspornya mencapai US$ 611,757 juta atau senilai 9 triliun rupiah.

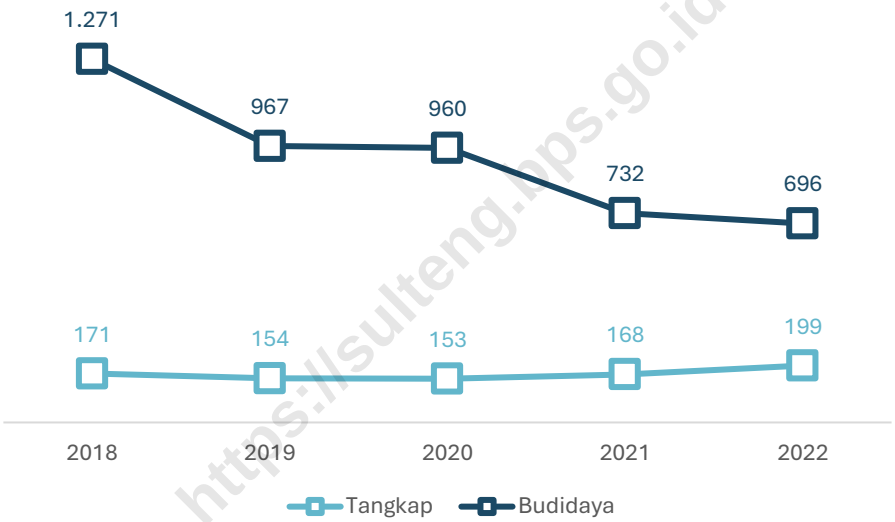

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan

Gambar 1.7 Volume Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Sulawesi Tengah (ribu ton), 2018—2022

Berdasarkan data dari kementerian terkait, total volume produksi perikanan budidaya Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2018-2022 juga menunjukan tren menurun menjadi 696 ribu ton pada 2022 atau berkurang signifikan dibandingkan lima tahun lalu (Gambar 1.7). Sementara volume produksi perikanan tangkap meski relatif turun pada 2019-2020 dan sudah mulai naik pada 2021-2022, namun seolah stabil dan belum ada peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukan ada celah atau peluang untuk kembali memaksimalkan pemanfaatan potensi perikanan yang ada.

Tabel 1.4 Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

Kabupaten/Kota	Volume (ribu ton)	Nilai (miliar Rp)
(1)	(2)	(3)
Morowali	33,41	1.127,50
Banggai Laut	28,36	642,46
Donggala	24,08	432,17
Toli-Toli	22,58	449,75
Parigi Moutong	20,53	536,36
Banggai Kepulauan	19,51	575,96
Buol	19,17	442,71
Banggai	12,03	255,37
Tojo Una-Una	10,64	374,00
Poso	4,26	157,09
Morowali Utara	1,94	62,95
Kota Palu	1,87	73,50
Sigi	0,19	4,76
Sulawesi Tengah	**198,58**	**5.134,58**

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan

https://sulteng.bps.go.id

Jika diperhatikan menurut 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah baik produksi perikanan tangkap atau budidaya, terlihat Kabupaten Morowali menghasilkan perikanan tangkap yakni sebesar 33,4 ribu ton yang senilai sekitar 1,13 triliun rupiah. Kemudian, disusul oleh Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Donggala yang berturut-turut sebesar 28,4 ribu ton dan 24,1 ribu ton, yang masing-masing senilai 642,5 miliar rupiah dan 432,2 miliar rupiah. Sedangkan produksi terendah terjadi pada Kabupaten Sigi sekitar 190 ton dengan nilai sebesar 4,8 miliar rupiah.

Selama 2022, komoditas utama perikanan laut di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain jenis cakalang, tongkol, tuna, dan rumput laut. Untuk perikanan tangkap cakalang terbesar ada di Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan perikanan tangkap tongkol tertinggi ada di Kabupaten Banggai Laut. Selain itu, perikanan tangkap tuna tertinggi ada di Kabupaten Morowali. Di samping itu, komoditas rumput laut juga memiliki nilai yang cukup besar di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana lokasi rumput laut terkonsentrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.

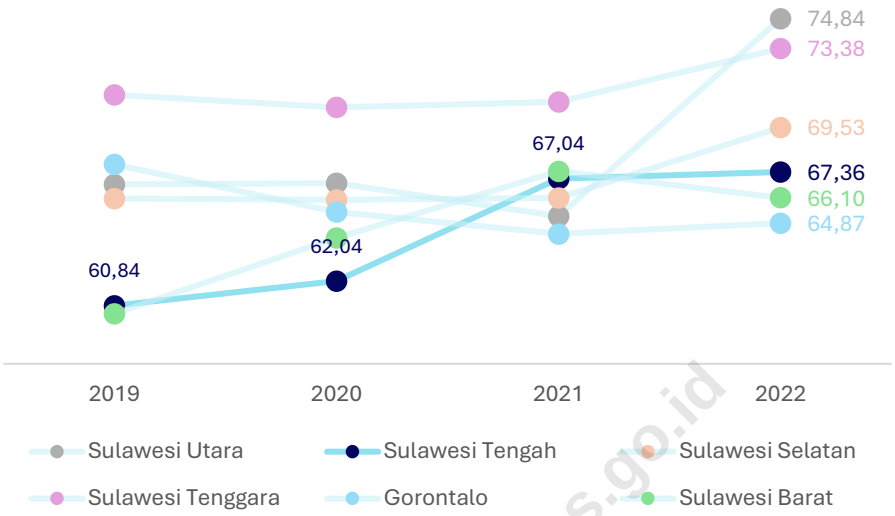

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan

Gambar 1.8 Angka Konsumsi Ikan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (kg/kapita/tahun), 2019—2022

https://sulteng.bps.go.id

Ikan memang merupakan sumber pangan yang sangat digemari di seluruh dunia, permintaannya terus meningkat karena kandungan nutrisi ikan yang tinggi, termasuk protein berkualitas dan asam lemak omega-3. Hasil Perikanan di Pulau Sulawesi sangat beragam karena masing-masing daerah mempunyai jenis ikan dan sumberdaya alam yang spesifik, yang pemanfaatannya juga menggunakan cara dan teknologi yang berbeda. Produksi ikan di suatu daerah dapat dianggap sebagai potensi ketersediaan ikan untuk dikonsumsi di daerah tersebut (KKP, 2017). Konsumsi ikan tertinggi tahun 2022 terdapat di Provinsi Sulawesi Utara yakni sebesar 74,84 kg/kapita/tahun dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 73,38 kg/kapita/tahun. Konsumsi ikan terendah terjadi di Provinsi Gorontalo dengan nilai sebesar 64,87 kg/kapita/tahun yang diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat sekitar 66,10 kg/kapita/tahun (Gambar 1.8).

Selain berkontribusi pada aspek ekonomi, subsektor perikanan juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, Jumlah Rumah Tangga Usaha Subsektor Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 48.281 unit (BPS, 2023). Sayangnya, angka ini menurun sekitar 7,27 persen dibandingkan hasil Sensus Pertanian 2013 yaitu sebanyak 52.069 unit usaha. Sementara itu, jumlah Usaha Pertanian

Perorangan Subsektor Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat 50.129 unit pada 2023. Berdasarkan Gambar 1.9, dari 13 Kabupaten/Kota, Kabupaten Parigi Moutong memiliki paling banyak usaha perikanan perorangan yakni sebesar 7.780 unit. Disusul dengan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu sebesar 5.493 unit. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan masih menjadi salah satu tumpuan hidup sebagian orang, sehingga potensi dan pemanfaatannya sangat perlu untuk dikembangkan.

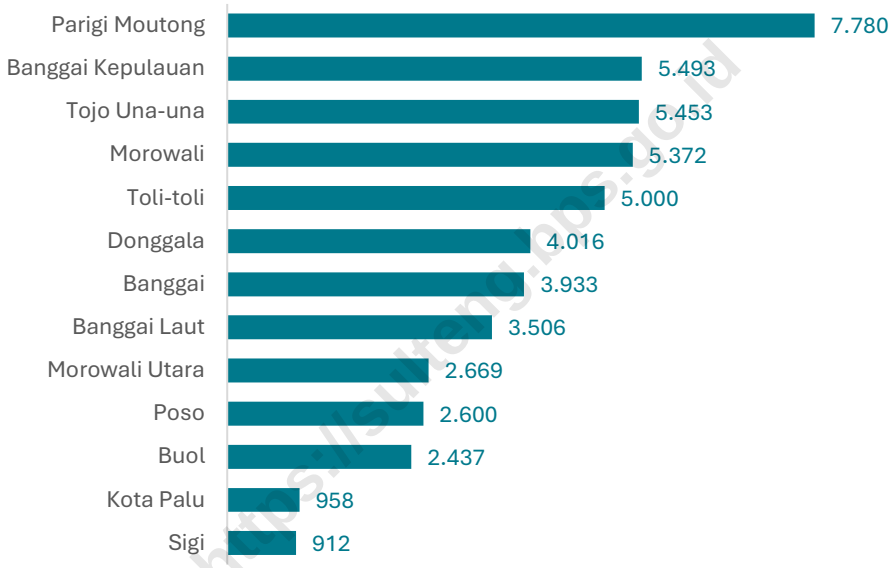

Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2023

Gambar 1.9 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Subsektor Perikanan Menurut Kabupaten/Kota dan di Provinsi Sulawesi Tengah (unit), 2023

Selanjutnya adalah informasi ketersediaan jumlah kapal motor perikanan laut menurut provinsi di kawasan Sulawesi. Penggunaan kapal motor besar dalam perikanan memiliki dampak signifikan terhadap hasil tangkap di laut. Kapal motor besar biasanya dilengkapi dengan peralatan modern dan ruang penyimpanan yang lebih besar, memungkinkan penangkapan ikan dalam jumlah yang lebih banyak dalam sekali perjalanan. Kapal motor besar juga memiliki jangkauan operasional yang lebih luas dan kemampuan beroperasi di perairan yang lebih dalam. Biasanya juga dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sonar, radar, dan peralatan navigasi modern yang meningkatkan kemampuan untuk menemukan dan menangkap ikan.

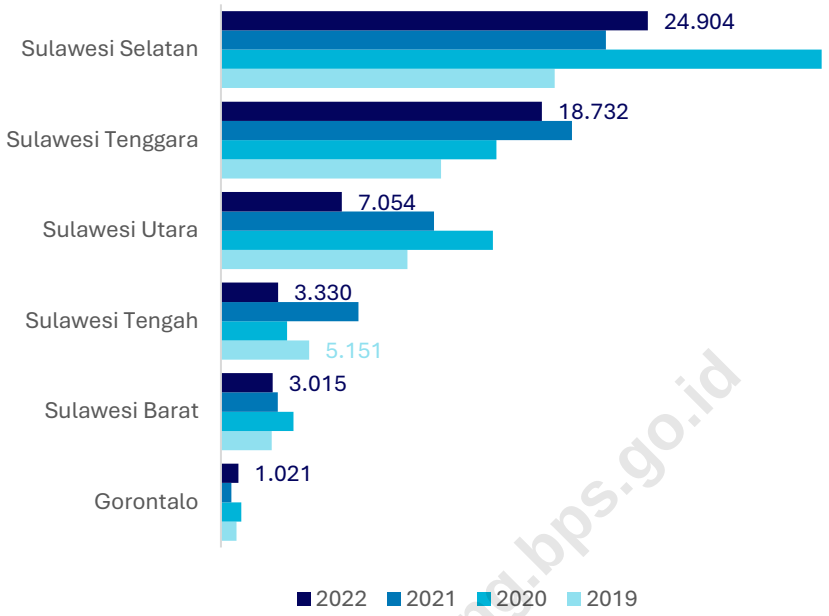

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan

Gambar 1.10 Jumah Kapal Motor Perikanan Laut menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (unit), 2019—2022

https://sulteng.bps.go.id

Gambar 1.10 menunjukkan perkembangan jumlah Kapal Motor Perikanan Laut menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (Unit) tahun 2019-2022. Pada 2022, Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang memiliki paling banyak jumlah kapal motor perikanan laut di antara 6 provinsi lainnya, dengan jumlah sebanyak 24,9 ribu unit. Sedangkan, Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki sekitar 3,33 ribu unit atau berada di urutan ke 4 terbanyak setelah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Padahal Sulawesi Tengah memiliki garis pantai paling panjang dibandingkan enam provinsi lainnya. Selain itu, jumlah kapal tersebut cenderung turun di 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana, jumlah kapal laut motor di Provinsi Sulawesi Tengah pada 2022 tercatat turun dibandingkan 4 tahun lalu yang sebesar 5,15 ribu unit pada 2019 atau berkurang sekitar 35 persen.

Perlu kajian yang lebih mendalam apakah ketersediaan kapal motor yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain menjadi sebab produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tengah juga relatif lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Ini perlu menjadi perhatian sebagai upaya meningkatkan produksi perikanan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan

penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Selain itu, pemanfaatan sumber daya laut yang dilakukan secara bijaksana akan menjadi pilar utama dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi investasi, realisasi investasi di Sulawesi Tengah memberikan gambaran sedikit kontradiksi dengan volume produksi hasil perikanannya. Bisa jadi penyebabnya adalah nilai investasi dan nilai produksi perikanan di Sulawesi Tengah yang masih cukup jauh perbedaannya. Sulawesi Tengah menempati peringkat pertama sepanjang empat tahun terakhir dibandingkan provinsi di Pulau Sulawesi. Tahun 2023, investasi sektor perikanan di Sulawesi Tengah terealisasi sebesar 159,444 miliar rupiah, disusul Sulawesi Tenggara dengan realisasi investasi sebesar 97,202 miliar rupiah sedangkan realisasi investasi terendah terjadi di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

https://sulteng.bps.go.id

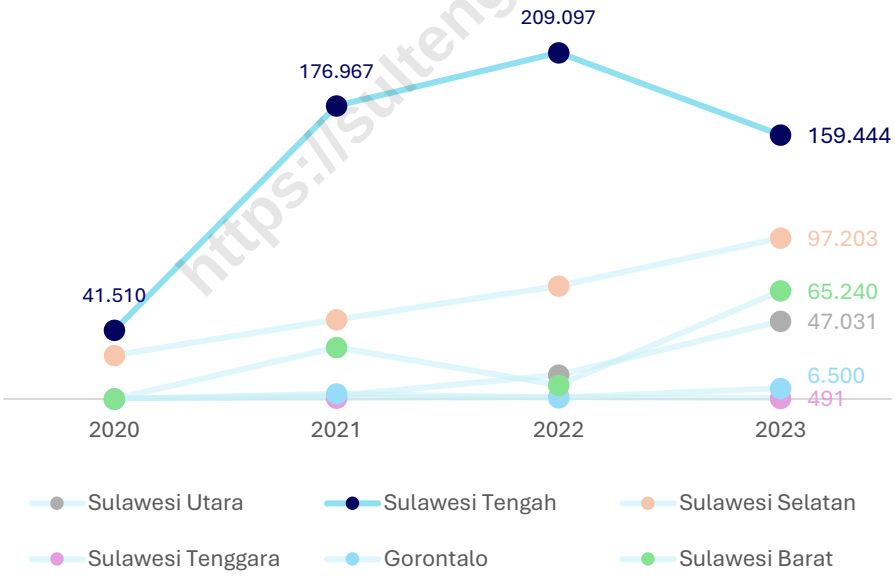

Sumber: *https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik*

Gambar 1.11 Realisasi Investasi PMA/PMDN sektor Perikanan (juta rupiah), 2020—2023

Sebelum terlewat, ada komoditas kelautan yang penting bagi Indonesia, dimana selama ini banyak dipenuhi melalui mekanisme impor dari luar negeri yaitu garam. Indonesia memiliki wilayah lautan lebih luas

dibandingkan daratan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan garamnya sendiri. Hingga 2023, impor garam Indonesia masih terus melonjak, tercatat nilai impor garam mencapai US$ 135,3 juta atau setara dengan 2,8 juta ton garam.

Di kawasan Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi penghasil garam kedua setelah Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah berhasil memproduksi garam sebesar 1000an ton garam pada tahun 2023. Sulawesi Tengah masih berpotensi memperluas lahan tambak garam dan meningkatkan produksi garamnya mengingat memiliki garis pantai yang panjang dan iklim tropis ideal. Hanya saja menghadapi berbagai tantangan seperti garam lokal yang mengandung kadar pengotor yang tinggi sehingga belum memenuhi standar industri, pemanfaatan teknologi produksi dan pengolahan garam yang dirasa masih minim, sekaligus keterampilan petani garam yang masih perlu dikembangkan.

Tabel 1.5 Volume dan Nilai Produksi Garam Tambak Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2019 – 2022

Provinsi	2019		2020		2021		2022	
	Produksi (ton)	Nilai (juta Rp)	Produksi (ton)	Nilai (juta Rp)	Produksi (ton)	Nilai (juta Rp)	Produksi (ton)	Nilai (juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sulawesi Utara	–	–	–	–	–	–	–	–
Sulawesi Tengah	–	–	–	–	–	–	–	–
Sulawesi Selatan	140.335,23	67.486,31	45.310,5	26.684,65	5.842,35	7.286,15	7.176,75	13.707,8
Sulawesi Tenggara	693,7	2.461,65	808,76	808,76	394,71	394,71	1.239,04	1.920,78
Gorontalo	–	–	4,8	9,6	9,71	48,55	0,8	1,6
Sulawesi Barat	–	–	–	–	–	–	–	–

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan

https://sulteng.bps.go.id

C. Melestarikan Sumber Daya Laut

Melestarikan sumber daya laut merupakan bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs), khususnya pada Tujuan 14: "Kehidupan di Bawah Air" (*Life Below Water*). Tujuan ini menekankan pentingnya konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut dan samudra secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian adalah mengurangi polusi laut termasuk sampah dan limbah berbahaya, restorasi terumbu karang, pembentukan kawasan konservasi laut termasuk hutan mangrove, dan seterusnya. Sehingga dapat menjaga sumber daya laut, yang tidak hanya penting bagi ekosistem tetapi juga untuk kesejahteraan manusia secara keseluruhan

Data yang disajikan berasal dari Pengumpulan data Podes 2021, dimana pendataan ini dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan.

https://sulteng.bps.go.id

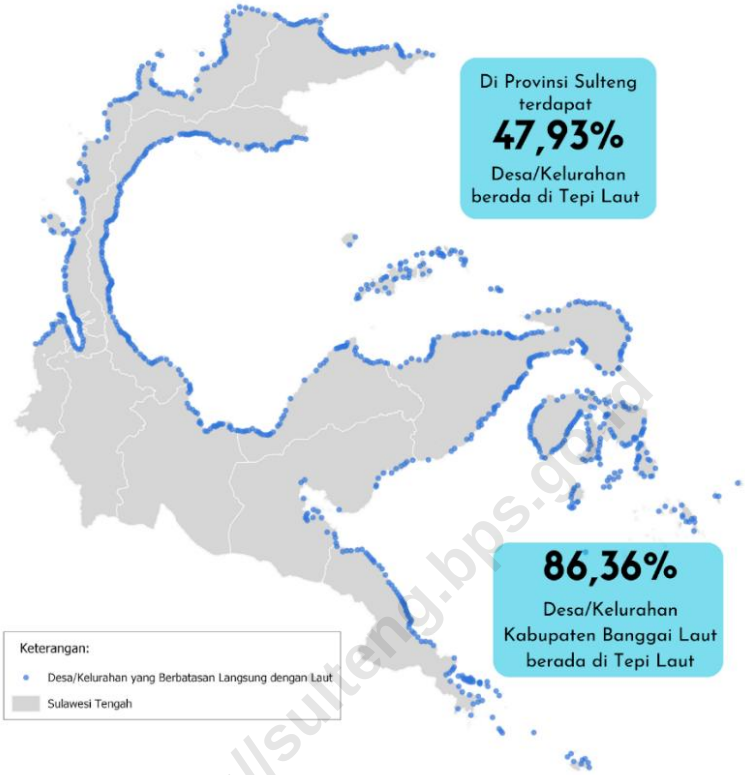

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: Badan Pusat Statistik, Potensi Desa 2021

Gambar 1.12 Sebaran Desa/Kelurahan yang Berbatasan Langsung dengan Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Berdasarkan Data Podes tahun 2021, bahwa dari 2.020 kelurahan/desa di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 950 desa atau sekitar 47,93 persen berada di tepi laut. Dimana, Kabupaten Parigi Moutong memiliki paling banyak desa/kelurahan yang berada di tepi laut, yaitu 162 desa/kelurahan. Kemudian, ada 539 desa/kelurahan Provinsi Sulawesi Tengah tercatat memiliki tanaman mangrove, yang mana keberadaannya sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya abrasi atau pengikisan tanah di daerah pesisir pantai.

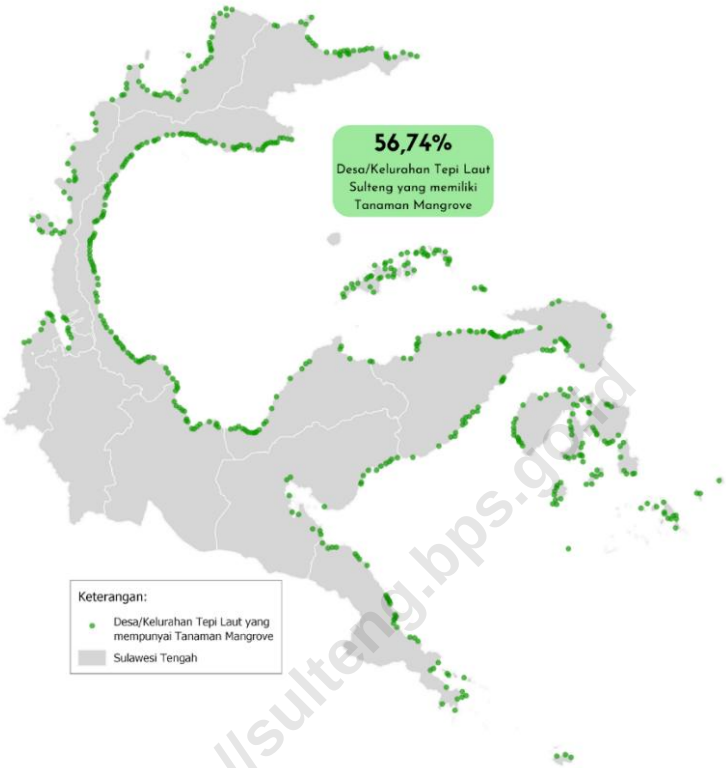

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: Badan Pusat Statistik, Potensi Desa 2021

Gambar 1.13 Sebaran Desa/Kelurahan Tepi Laut yang mempunyai Tanaman Mangrove di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Selain itu, ekosistem kawasan pesisir akan semakin stabil jika semakin tertutup oleh hutan mangrove (Karminarsih, 2007). Secara ekologis, salah satu fungsi tanaman mangrove yakni melindungi dan melestarikan kawasan pesisir dari erosi dan serangan gelombang besar, seperti tsunami dan angin. Menurut hasil Potensi Desa 2021 di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa hanya 539 dari 950 desa/kelurahan tepi laut yang memiliki tanaman mangrove. Artinya, sekitar 56,74 persen desa/kelurahan di kawasan pesisir dilindungi oleh tanaman mangrove dari pengikisan tanah. Sedangkan 43,26 persen sisanya merupakan wilayah yang sangat riskan mengalami kerusakan berbagai jenis flora dan fauna yang memiliki nilai komersial.

Pada cakupan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, ternyata desa/kelurahan tepi laut Kabupaten Donggala dan Kota Palu memiliki persentase tanaman mangrove terendah, masing-masing sebesar 37,08 persen dan 37,50

persen. Dengan kata lain, desa/kelurahan di kedua wilayah tersebut memiliki peluang paling besar mengalami kerusakan di kawasan pesisir laut. Padahal, kedua wilayah tersebut menjadi bagian dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya peran strategis tanaman mangrove untuk melindungi dan melestarikan komponen ekosistem wilayah pesisir dan laut, tanaman mangrove sangat dibutuhkan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, program perlindungan dan pelestarian mangrove perlu mendapatkan perhatian dan prioritas yang tinggi.

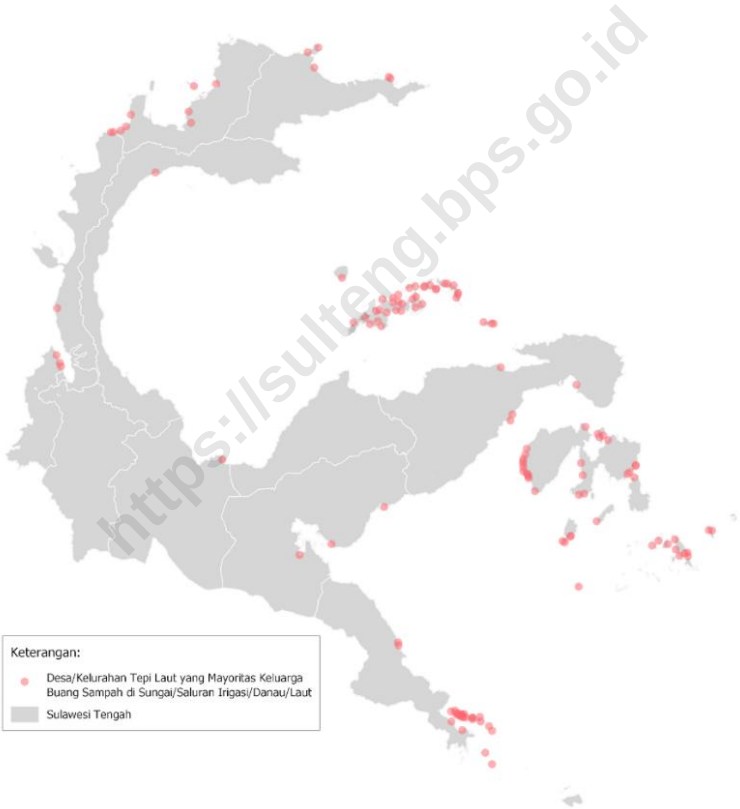

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: Badan Pusat Statistik, Potensi Desa 2021

Gambar 1.14 Sebaran Desa/Kelurahan Tepi Laut Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Mayoritas Keluarga Buang Sampah di Sungai/Saluran Irigasi/Danau/laut, 2021

Selain itu, hanya 2 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang sebagian besar keluarga tidak membuang sampah di sungai/saluran irigasi/danau/laut yakni, Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Sedangkan sisanya, tersebar pada 154 desa/kelurahan yang sebagian besar keluarga yang

membuang sampah di sungai/saluran irigasi/danau/laut atau sekitar (Podes, 2021). Angka ini masih cukup tinggi dan ternyata banyak warga masyarakat Sulawesi Tengah yang belum peduli kelestarian lingkungan. Meskipun, banyaknya desa/kelurahan yang membuang sampah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2018, yaitu sebanyak 289 desa/kelurahan.

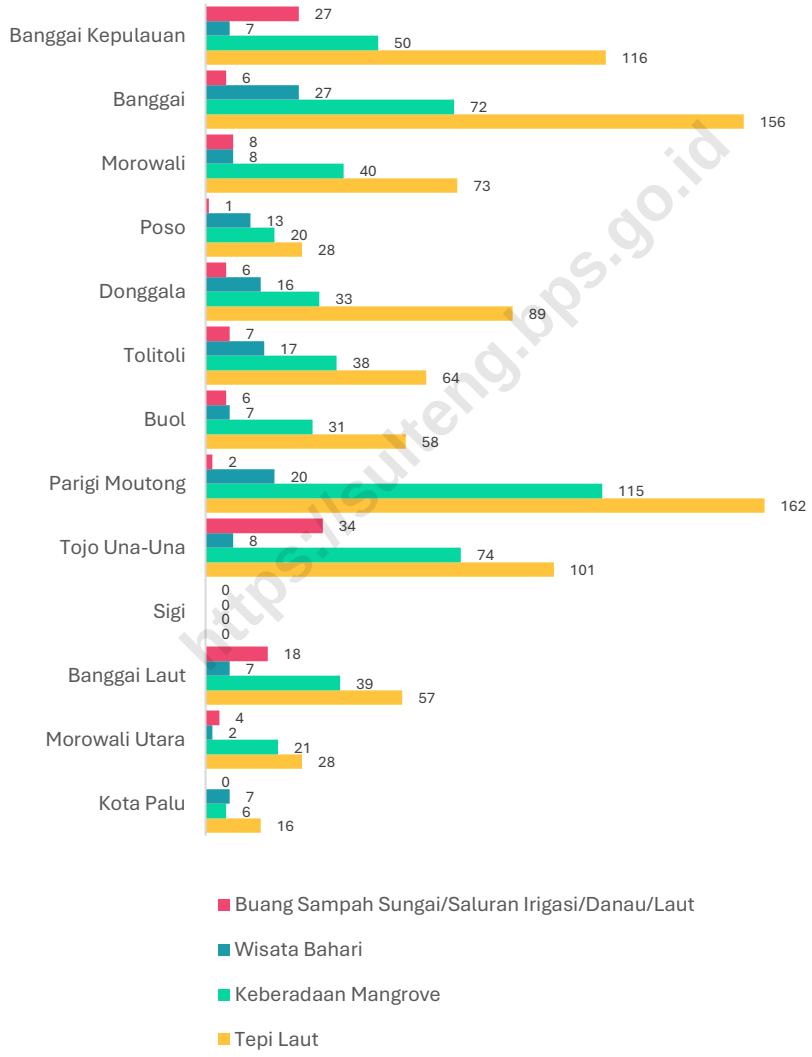

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: Badan Pusat Statistik, Potensi Desa 2021

Gambar 1.15 Jumlah Desa/Kelurahan Tepi Laut yang memiliki Tanaman Mangrove, Wisata Bahari, dan Tempat Pembuangan Sampah di Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Memelihara laut tidak hanya penting untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui sektor pariwisata. Pariwisata adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan merupakan sumber devisa dan membuka lapangan kerja. Upaya konservasi laut dapat menciptakan lingkungan wisata yang menarik, mendukung perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut.

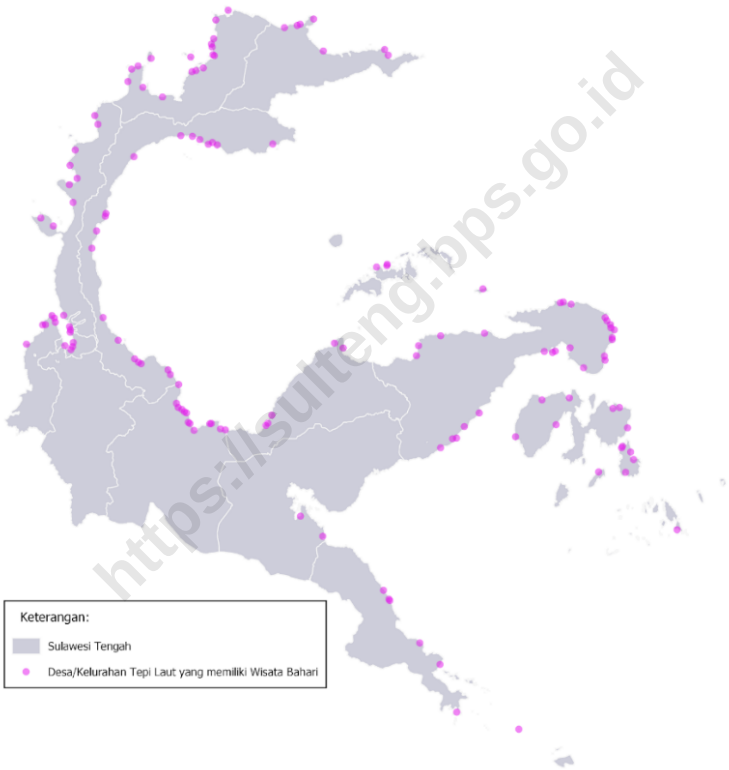

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: BPS, Potensi Desa 2021

Gambar 1.16 Sebaran Desa/Kelurahan Tepi Laut yang memiliki Wisata Bahari di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Berdasarkan pendataan Potensi Desa (Podes) Tahun 2021, dimana yang jadi narasumber dalam pendataan tersebut adalah para perangkat desa yang memahami kondisi desa, diperoleh informasi setidaknya ada 139 desa/kelurahan bahari di Sulawesi Tengah (Gambar 1.16). Desa bahari artinya desa tersebut secara geografis berbatasan dengan tepi laut dan memiliki wisata bahari. Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah

memiliki desa bahari menurut pendataan ini. Kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki persentase jumlah desa bahari terbesar terhadap total desa di daerahnya adalah kabupaten Toli-toli yaitu sebesar 15,45 persen.

Desa/kelurahan bahari yang tersebar di sepanjang pantai Sulawesi Tengah memang memiliki potensi besar untuk menjadi objek wisata. Dengan pendekatan yang tepat, desa bahari tersebut bisa menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Setidaknya ada beberapa hal yang bisa dijadikan rujukan untuk pengembangan potensi wisata, pertama memutuskan desa-desa yang paling berpotensi dan dibina untuk diprioritaskan menjadi obyek wisata, meningkatkan infrastruktur seperti akses jalan, transportasi laut, akomodasi dan fasilitas wisata di lokasi tersebut. Pentingnya juga mempromosikan destinasi wisata melalui berbagai platform media sosial. Berikutnya melatih masyarakat lokal untuk mengembangkan produk wisata di desa, menjadi pemandu wisata, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dan sebagainya.

https://sulteng.bps.go.id

D. Kesimpulan

Ekonomi laut yang berkelanjutan bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya laut yang potensial, terlihat dari kawasan pesisir pantai yang panjang, lokasi perairan yang strategis, dan daya saing perikanan yang tinggi. Namun, pemanfaatan sumber daya laut di kawasan pesisir pantai masih perlu ditingkatkan seperti, perikanan tangkap, perikanan budidaya, tambak garam, dan wisata bahari.

Untuk menjaga keberlanjutan nilai ekonomi sumber daya laut diperlukan lingkungan yang *liveable* bagi makhluk hidup disekitarnya. Melestarikan tanaman mangrove dan larangan membuang sampah di perairan sangat berperan penting untuk melindungi dan menjaga komponen ekosistem wilayah pesisir dan laut. Hal ini merupakan bentuk upaya mendukung program *blue economy* dan SDGs 14 tentang *Life Below Water* di Provinsi

Sulawesi Tengah. Untuk itu, program perlindungan dan pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan laut perlu mendapatkan perhatian dan prioritas yang tinggi di 'Tanah Kaili'.

E. Daftar Pustaka

BPS. 2023. *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu: BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

—. 2024. *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu: BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

—. 2024. *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI GORONTALO MENURUT LAPANGAN USAHA 2019-2023*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.

—. 2024. *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT LAPANGAN USAHA 2019-2023*. Mamuju: BPS PROVINSI SULAWESI BARAT .

—. 2024. *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT LAPANGAN USAHA 2019-2023*. Makassar: BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN.

—. 2024. *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT LAPANGAN USAHA 2019-2023*. PALU: BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH .

—. 2024. *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT LAPANGAN USAHA 2019-2023*. KENDARI: BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA .

—. 2024. *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT LAPANGAN USAHA 2019-2023*. MANADO: BPS PROVINSI SULAWESI UTARA .

—. 2023. *Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023*. JAKARTA: BPS.

—. 2014. *Sensus Pertanian 2013: Hasil Pencacahan Lengkap Provinsi Sulawesi Tengah*. PALU: BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

—. 2018. *Statistik Potensi Desa Provinsi Sulawesi Tengah 2018*. PALU: BPS Provinsi Sulawesi Tengah .

https://sulteng.bps.go.id

—. 2021. *Statistik Potensi Desa Provinsi Sulawesi Tengah 2021*. PALU: BPS Provinsi Sulawesi Tengah .

DKP Sulteng. 2022. *PROFIL WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SULAWESI TENGAH*. 15 December. https://siperlu.dkp.sultengprov.go.id/detail/profil-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-sulawesi-tengah#:~:text=Provinsi%20Sulawesi%20Tengah%20merupakan%20provinsi,Dolongan%2C%20Pulau%20Lingayan%2C%20dan%20Pulau.

Karminarsih, Emi. 2007. "Pemanfaatan Ekosistem Mangrove bagi Minimasi Dampak Bencana di Wilayah Pesisir." *Pemikiran Konseptual* 182-187.

KKP. 2017. *Analisis Indikator Kinerja Utama Kelautan dan Perikanan Indonesia: Angka Konsumsi Ikan*. Jakarta: Pusat Data, Statistik, dan Informasi; KKP.

—. 2018. *Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

—. 2024. *Statistik KKP*. https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2.

OLTEANU, Ana, and Viorela STINGA. 2018. "The Economic Impact of the Blue Economy." *Communicative Action & Transdisciplinarity in*. Targoviste: LUMEN International Scientific.

Perda Sulteng. 2023. "Perda Provinsi Sulteng Nomor 1 Tahun 2023; RTRW Provisnsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042." Palu.

World Bank. 2017. *THE POTENTIAL OF THE BLUE ECONOMY; Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*. Washington: The World Bank.

https://sulteng.bps.go.id

2 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Pertanian

A. Agenda Pembangunan Berkelanjutan Ke-2 "*Zero Hunger*"

B. Gambaran Produksi Padi

C. Ketersediaan dan Konsumsi Beras

D. Pemenuhan Kebutuhan Beras Antar Wilayah

E. Fenomena Terkait Sektor Pertanian

F. Kesimpulan

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Pertanian

A. Agenda Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Ke-2 "*Zero Hunger*"

Kesempatan selanjutnya akan difokuskan pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 2 (SDGs 2) berjudul "*Zero Hunger*" atau Tanpa Kelaparan" yang berorientasi pada tujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian berkelanjutan, memberdayakan petani kecil, mengakhiri kemiskinan pedesaan, dan memastikan gaya hidup sehat.

Kemiskinan dan kelaparan ekstrem sebagian besar juga terjadi di pedesaan, dimana petani kecil dan keluarga mereka merupakan bagian terbesar dari masyarakat miskin dan kelaparan. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan berkaitan erat dengan peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian, dan pendapatan pedesaan. Sistem pertanian harus menjadi lebih produktif dan mengurangi pemborosan. Praktek pertanian berkelanjutan dan sistem pangan, termasuk produksi dan konsumsi, harus dilaksanakan dari perspektif holistik dan terpadu.

Peningkatan proses pengambilan keputusan yang terintegrasi di tingkat nasional dan regional diperlukan untuk mencapai sinergi dan mengatasi *trade-off* antara pertanian, air, energi, lahan dan perubahan iklim. Mengingat perkiraan perubahan suhu, curah hujan dan hama yang terkait dengan perubahan iklim, komunitas global diharapkan meningkatkan investasi dalam penelitian, pengembangan dan demonstrasi teknologi untuk meningkatkan keberlanjutan sistem pangan di mana pun. Membangun ketahanan sistem pangan lokal sangatlah penting untuk mencegah kekurangan pangan dalam skala besar di masa depan dan untuk memastikan ketahanan pangan dan nutrisi yang baik bagi semua orang

https://sultra.bps.go.id

Berdasarkan tujuan dan target pembangunan berkelanjutan diatas dipandang perlu mencermati upaya dan capaian Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sektor Pertanian pada level regional khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bahan evaluasi sekaligus perencanaan pada masa mendatang.

B. Gambaran Produksi Padi

B.1 Ruang dan Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi. Luasnya membentang dari bagian utara Pulau Sulawesi hingga bagian tenggara. Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Teluk Tomini merupakan teluk terbesar di Indonesia dengan berbagai kekayaan alam laut di dalamnya. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, serta bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Sulawesi Tengah termasuk wilayah yang dilintasi garis khatulistiwa. Garis ini membentang di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis. Akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta sebagian Pulau Sumatera, musim hujan di Sulawesi Tengah antara bulan April dan September sedangkan musim kemarau antara Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3.000 milimeter per tahun yang termasuk curah hujan terendah di Indonesia.

https://sultengbps.id/

Sumber: Badan Informasi Geospasial

Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah memiliki beberapa kawasan konservasi seperti suaka alam, suaka margasatwa dan hutan lindung yang memiliki keunikan flora dan fauna yang sekaligus menjadi objek penelitian bagi para ilmuwan dan naturalis. Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari wilayah pegunungan dan perbukitan yang mencakup sebagian besar wilayah provinsi, serta dataran rendah yang umumnya tersebar di sepanjang pantai dan sekitarnya.

Sulawesi Tengah memiliki banyak pulau. Menurut data BPS, jumlahnya mencapai 1.632 pulau. Beberapa pulau yang terkenal karena keindahannya, yaitu Kepulauan Togean, Pulau Kadidiri, Pulau Pasoso, dan Pulau Lutungan. Wilayah ini memiliki dua danau, yaitu Danau Poso dan Lindu, beberapa

sungai yang cukup besar dan pegunungan yaitu Gunung Sojol, Bulu Tumpu, Hohoban, Balantak Tompotika, Witim-pondo, Mungku, Mapipi, Nokilalaki, dan Loli. Wilayah Sulawesi Tengah termasuk daerah rawan bencana alam terutama gempa bumi. Wilayah ini dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.

Provinsi Sulawesi Tengah yang begitu luas, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengakses semua kabupaten. Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu) terletak di bagian barat Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso. Sementara 8 daerah lain meliputi: Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali, jaraknya lebih jauh dari ibu kota provinsi, sehingga jika melalui perjalanan darat membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama. Sedangkan untuk perjalanan udara masih belum terakomodasi secara jadwal maupun ketersediaan maskapai.

Di wilayah darat dan perairan Sulawesi Tengah menyimpan potensi sumber daya alam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan pertambangan. Sumber daya alam tersebut menjadi penopang ekonomi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2020 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak lagi menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Sulawesi Tengah. Sektor ini mulai digeser oleh sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan dan Penggalian. Bahkan setiap tahunnya selama beberapa tahun terakhir sektor ini terus mengalami penurunan kontribusi. Meski demikian, sektor pertanian masih menjadi sektor dengan *share* kedua terbesar bagi perekonomian Sulawesi Tengah. Hal ini sebagaimana tergambarkan dalam Gambar 2.2.

https://sulteng.bps.go.id

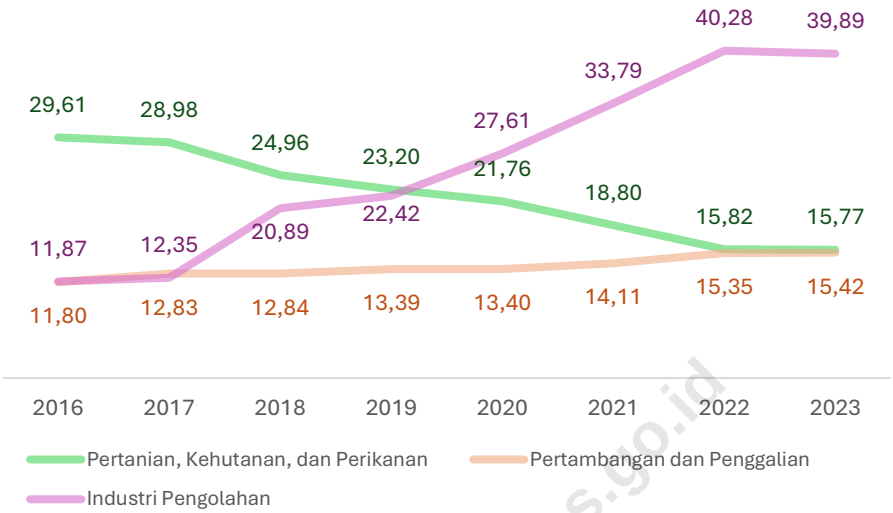

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, PDRB Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah 2016—2023

Gambar 2.2 Distribusi ADHB Tiga Sektor Terbesar di Sulawesi Tengah (persen), 2016—2023

https://sulteng.bps.go.id

Penurunan *share* PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak serta merta diakibatkan oleh penurunan nilai PDRB di sektor tersebut. Sejak kurun waktu 5 tahun terakhir sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 dimana adanya pandemi *Covid-19* mengakibatkan geliat perekonomian di berbagai sektor mengalami perlambatan. Pertanian di Sulawesi Tengah nyatanya masih menjadi salah satu sektor penunjang penting bagi pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah.

B.2 Pertanian Sulawesi Tengah

Mulai masuknya usaha pertambangan dan industri pengolahan tambang sejak 10 tahun terakhir di Sulawesi Tengah, turut mempengaruhi kontraksi angka PDRB di sektor Pertanian khususnya tanaman pangan. Selain angka PDRB yang turun, jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian menurut data BPS berdasarkan hasil Sakernas Februari pada tahun 2016-2024 terus mengalami penurunan. Kondisi yang berbeda antara indikator makro PDRB ADHB dan jumlah penduduk bekerja adalah posisi *share* penduduk yang bekerja di sektor pertanian tetap menjadi *leading sector* dan *gap* nya yang tinggi dibanding sektor lainnya. Sedangkan pada PDRB ADHB *share* sektor

pertanian terus mengalami penurunan. Hal ini justru mengindikasikan adanya ketidakseimbangan jumlah produksi ataupun pendapatan antar sektor-sektor tersebut.

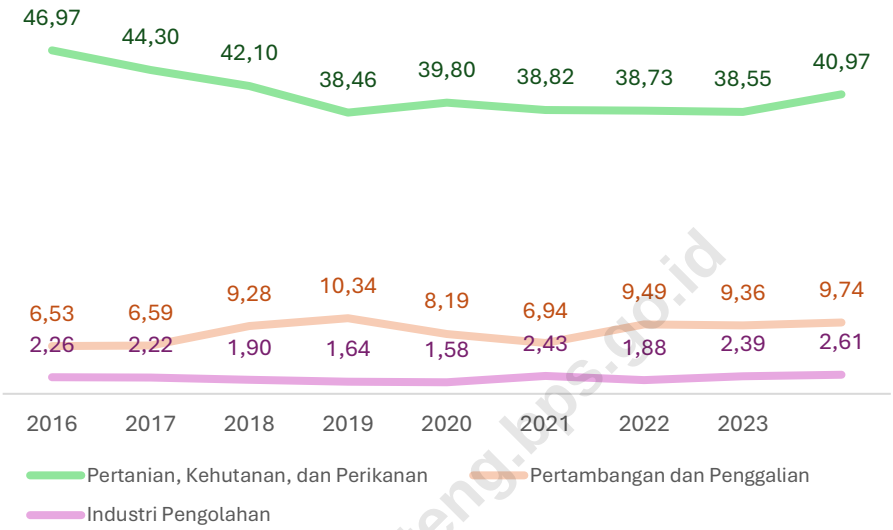

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah

Gambar 2.3 Distribusi Penduduk Bekerja di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Pertambangan dan Penggalian Provinsi Sulawesi Tengah (persen), 2016—2023

https://sultengl.bps.go.id

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki beberapa subsektor lain dengan berbagai pola kontribusinya. Salah satunya adalah subsektor tanaman pangan. Pemenuhan kebutuhan tanaman pangan yang didukung oleh berbagai varian jenis tanaman masih menempatkan padi sebagai komoditas favorit bagi penduduk Indonesia termasuk Sulawesi Tengah.

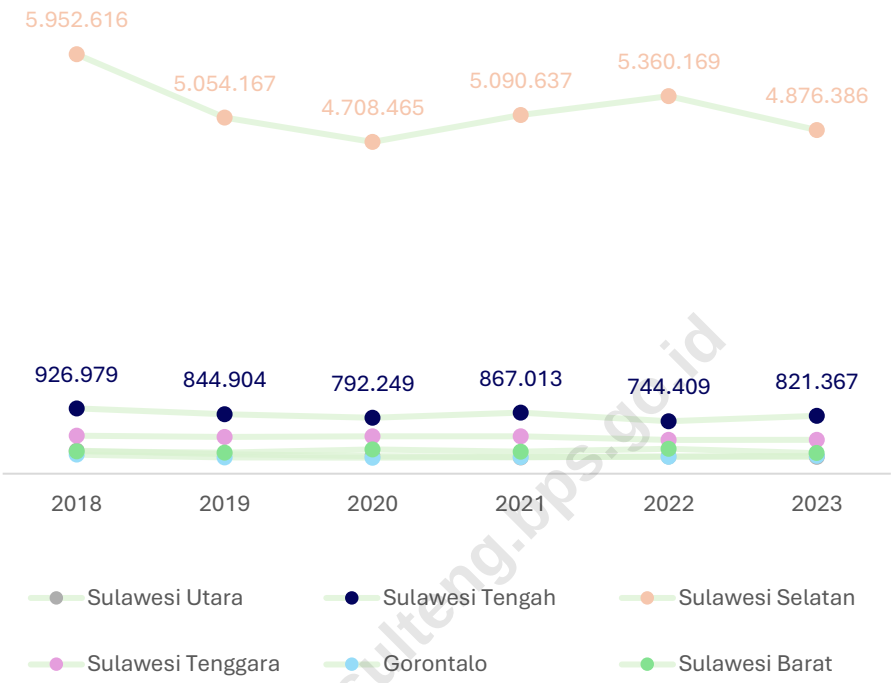

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.4 Produksi Padi Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi (ton), 2018—2023

Potensi pertanian Sulawesi Tengah dibidang tanaman pangan yaitu padi tergambar melalui Gambar 2.4 Sulawesi Tengah menduduki peringkat kedua tertinggi sebagai penghasil padi terbesar di Pulau Sulawesi. Namun, jika dibandingkan selisih produksinya masih sangat jauh dibandingkan peringkat pertama yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi padi Sulawesi Selatan jumlahnya 6 kali lipat lebih banyak dibanding Sulawesi Tengah. Melihat bentang alam Sulawesi Tengah yang jauh lebih luas dibanding Sulawesi Selatan terdapat potensi pertanian padi yang dapat lebih dikembangkan di masa depan.

Meskipun *share* terbesar pada sektor Pertanian berada pada subsektor Perkebunan namun untuk subsektor Tanaman Pangan juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, seiring dengan tren negatif *share* sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, *share* tanaman pangan juga terus mengalami penurunan sebagaimana tergambar pada Gambar 2.5.

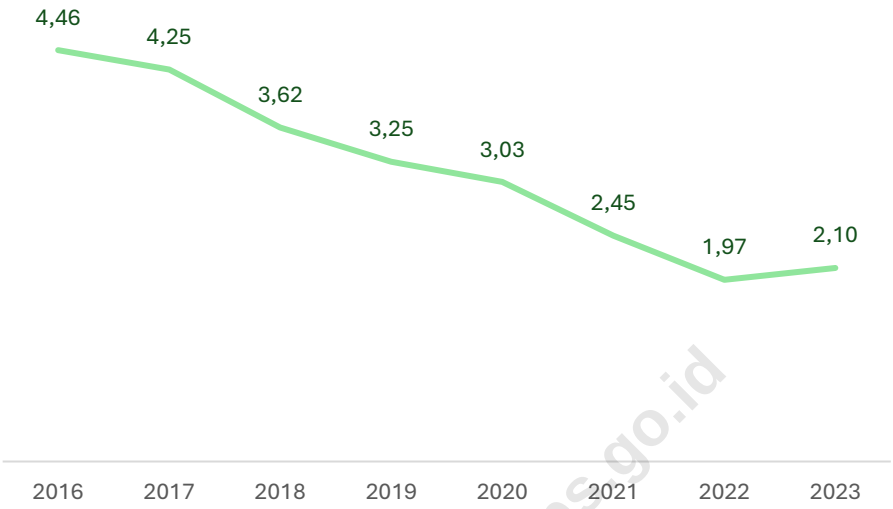

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, PDRB Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah 2016—2023

Gambar 2.5 *Share* Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah (persen), 2016—2023

https://sultengbps.go.id

Share subsektor tanaman pangan di Sulawesi Tengah masih didominasi dengan tanaman padi. Walaupun ada beberapa daerah yang juga didominasi oleh tanaman lain seperti jagung dan ubi. Pada tahun 2023 secara agregat luas panen padi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 177.699 hektar. Angka ini meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 168.993 hektar. Kabupaten Banggai Laut merupakan satu-satunya wilayah di Sulawesi Tengah yang tidak terdapat pertanian padi di daerahnya. Sebab di wilayah ini tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk setempat adalah umbi lokal yaitu Ubi Banggai.

Luas panen padi terbesar di Sulawesi Tengah pada tahun 2023 dan juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu ditempati oleh Kabupaten Parigi Moutong. Pada tahun 2023 luas panen Kabupaten Parigi Moutong sebesar 52.561 hektar. Sedangkan luas panen terendah berada pada Kota Palu yaitu hanya sebesar 162 hektar. Peta luas panen padi tahun 2023 berada pada Gambar 2.6.

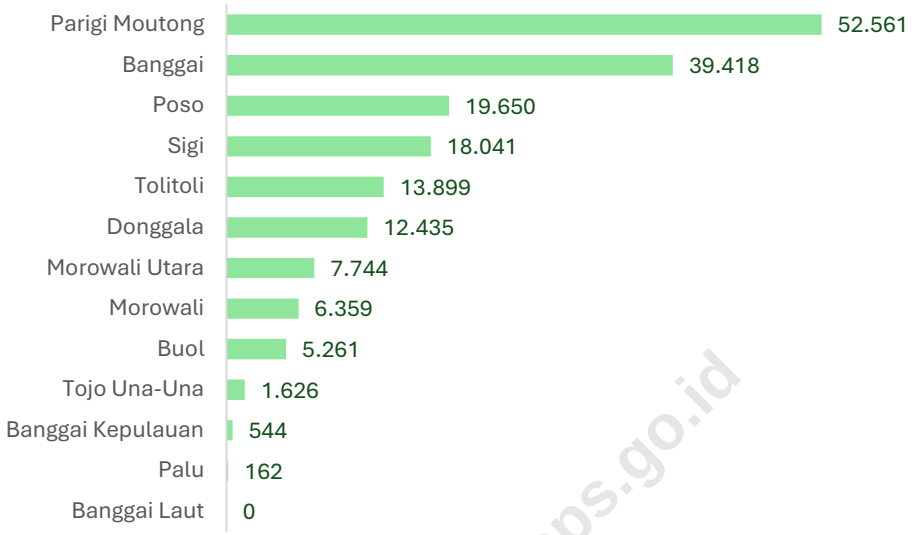

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.6 Luas Panen Padi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (hektar), 2023

https://sulteng.bps.go.id

B.3 Lahan Pertanian Sulawesi Tengah

Sebagaimana tergambarkan sebelumnya, Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami alih fungsi lahan pertanian yang sangat intensif karena pembangunan. Kondisi ini membuat luas lahan pertanian, terutama lahan sawah, mengalami penurunan yang dapat berakibat pada penurunan ketersediaan beras. Jumlah penduduk yang meningkat membuat kebutuhan konsumsi beras juga meningkat. Teori Malthus menyebutkan bahwa suatu saat, produksi pangan tidak dapat lagi menyeimbangkan kebutuhan manusia terhadap pangan.

Data produksi padi Sulawesi Tengah 2018-2023 (Gambar 2.7) menunjukkan adanya tren negatif. Pengaruh adanya alih fungsi lahan pertanian dan minat pekerja di bidang pertanian yang semakin menurun setiap tahun turut mengambil andil penurunan produksi padi di wilayah ini. Berikut adalah beberapa catatan mengenai data produksi padi yang digunakan oleh BPS

1. Kualitas produksi adalah Gabah Kering Giling (GKG)
2. Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar).

Produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas.

3. Data luas panen padi tahun 2018 dihitung dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), menggantikan metode pengumpulan data luas panen padi yang sebelumnya yaitu metode *eye estimate* yang dikumpulkan melalui pelaporan data Statistik Pertanian (SP) oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Kecamatan.
4. Angka produktivitas padi diperoleh melalui survei ubinan pada plot berukuran 2,5 m x 2,5 m dalam bentuk produksi Gabah Kering Panen (GKP) yang dikonversikan menjadi Gabah Kering Giling (GKG) berdasarkan angka konversi GKP ke GKG hasil Survei Konversi Gabah ke Beras tahun 2018.

https://sulteng.bps.go.id

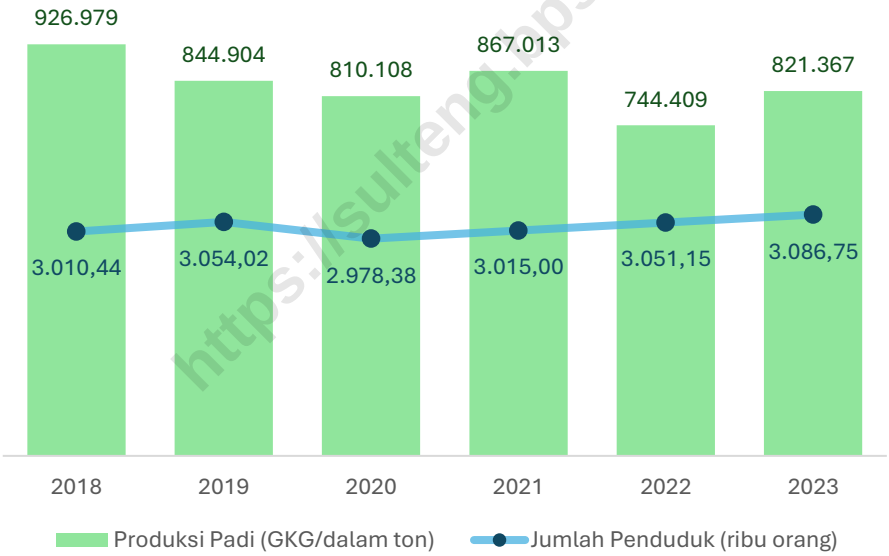

Sumber: sulteng.bps.go.id

Catatan: Jumlah Penduduk 2018-2019 merupakan hasil proyeksi SP2010. Jumlah Penduduk 2020 hasil SP2020. Jumlah Penduduk 2021-2023 merupakan hasil proyeksi LF SP2020.

Gambar 2.7 Produksi Padi dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2018—2023

Keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila ketersediaan beras lebih besar dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah dikatakan surplus beras, sedangkan apabila ketersediaan beras lebih kecil dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah dikatakan defisit beras. Salah satu aspek pangan, yaitu ketersediaan pangan, memiliki hubungan dengan luas lahan sawah

(Tambunan, 2008), luas tanam (Suwarno, 2010), produktivitas padi (Mulyo dan Sugiarto, 2014), dan produksi padi. Peningkatan luas lahan sawah, luas lahan panen, luas tanam, produktivitas padi, dan produksi padi dapat meningkatkan ketersediaan beras.

Penurunan angka produksi padi dan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya menjadi dasar penulisan analisis ini. Salah satu tujuan analisis ini untuk mengetahui ketersediaan beras, kebutuhan konsumsi beras, kondisi kecukupan beras, serta pemenuhan konsumsi beras di Provinsi Sulawesi Tengah.

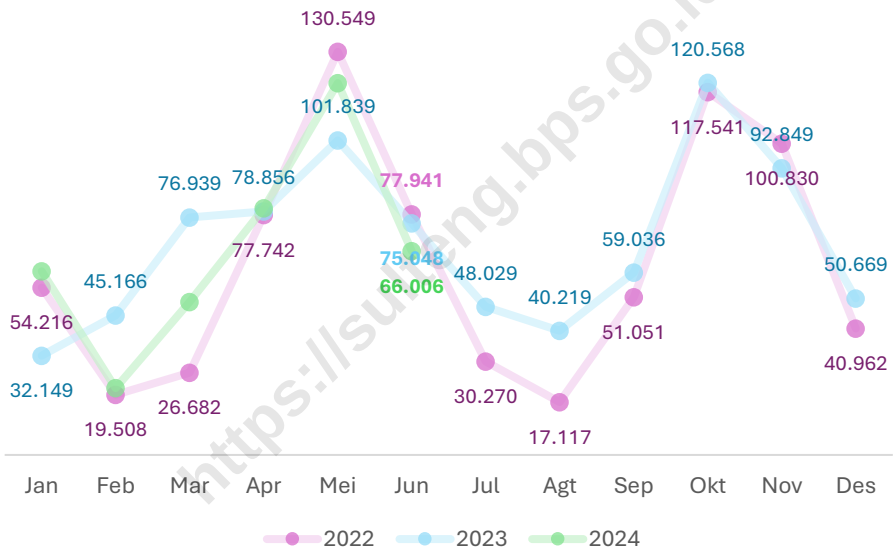

Sumber: sulteng.bps.go.id
Catatan: Data tahun 2024 merupakan angka sementara
Gambar 2.8 Produksi Padi Provinsi Sulawesi Tengah Bulanan (GKG/ton), 2022—2024

Data dianalisis melalui perhitungan ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras. Ketersediaan dan konsumsi beras dapat dihitung melalui rumus di bawah ini.

1. Luas panen dari hasil Survei KSA Padi oleh Badan Pusat Statistik.
2. Data produktivitas diperoleh melalui Survei Ubinan Badan Pusat Statistik.
3. Produksi padi = luas panen x produktivitas.
4. Produksi padi Jan-Jun 2024 merupakan angka sementara karena dihitung berdasarkan potensi luas panen Apr-Jun 2024 hasil amatan

KSA Maret 2024 dan rata-rata produktivitas hasil ubinan 2018-2023 (*subround* bersesuaian).

5. Produksi beras dihitung berdasarkan angka konversi gabah ke beras (Survei SKGB 2018) dan konversi susut/tercecer gabah/beras NBM 2018-2020.
6. Konsumsi = konsumsi per kapita x jumlah penduduk
7. Konsumsi per kapita menggunakan rata-rata konsumsi per kapita per provinsi hasil Susenas Maret tahun bersesuaian (rumah tangga) dan rata-rata konsumsi per kapita per provinsi hasil BAPOK 2017 (luar rumah tangga). Jumlah penduduk 2022 menggunakan proyeksi penduduk bulanan 2022 (SUPAS 2015). Jumlah penduduk 2023 menggunakan proyeksi penduduk bulanan 2023 (Proyeksi Penduduk Interim 2023). Jumlah penduduk 2024 menggunakan proyeksi penduduk bulanan 2024 (Hasil SP2020).
8. Konsumsi per kapita hasil Susenas Maret 2023 yang digunakan termasuk beras ketan.

Penelitian ini menggunakan asumsi setiap penduduk memiliki angka kebutuhan konsumsi beras yang sama. Asumsi yang digunakan adalah seluruh ketersediaan beras di suatu wilayah digunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras di wilayah tersebut. Apabila ketersediaan beras lebih besar dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah dikatakan surplus beras, sedangkan apabila ketersediaan beras lebih kecil dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah dikatakan defisit beras. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan diuji secara kuantitatif melalui perhitungan ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras, serta tabel silang. Analisis deskriptif komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sulawesi Tengah secara spasial.

https://sulteng.bps.go.id

B.4 Petani di Sulawesi Tengah

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Sensus Pertanian. Berbagai data berkaitan dengan kondisi pertanian dikumpulkan salah satunya data mengenai jumlah petani yang menjadi pengelola usaha pertanian. Petani pengelola usaha pertanian perorangan menurut ST2023

adalah orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain). Berikut adalah jumlah pengelola usaha pertanian subsektor tanaman pangan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Gambar 2.9).

Sebagai catatan, pada ST2023 tidak dikumpulkan data jumlah buruh tani maupun pekerja keluarga di bidang pertanian. Data yang ditampilkan melalui grafik hanya mencakup petani yang menjadi pengelola usaha pertanian perorangan. Selain itu, data yang ditampilkan belum berfokus pada petani yang mengusahakan tanaman padi namun masih mengglobal pada subsektor tanaman pangan. Pada gambar terlihat bahwa petani sebagai pengelola usaha pertanian perorangan subsektor tanaman pangan terbanyak berada di Kabupaten Sigi dimana luas panen Kabupaten Sigi berada pada peringkat keempat tertinggi se-Sulawesi Tengah. Terdapat peluang bahwa petani subsektor tanaman pangan di Kabupaten Sigi tidak hanya berfokus pada tanaman padi namun juga tanaman lainnya. Sedangkan wilayah dengan petani terbanyak kedua adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan luas panen tertinggi di Sulawesi Tengah. Jumlah petani subsektor tanaman pangan di Kabupaten Banggai Laut terendah di Sulawesi Tengah dimana di wilayah ini tidak terdapat aktivitas pertanian padi, sehingga petani subsektor tanaman pangan di wilayah ini berfokus pada aktivitas pertanian tanaman pangan lain selain padi. Namun, jika dilihat 4 besar wilayah penghasil luas panen Padi tertinggi juga sejalan dengan 4 besar jumlah petani terbesar di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan persebaran petani pengelola lahan pertanian tanaman pangan suatu wilayah sejalan dengan luas panen wilayah tersebut.

https://sulteng.bps.go.id

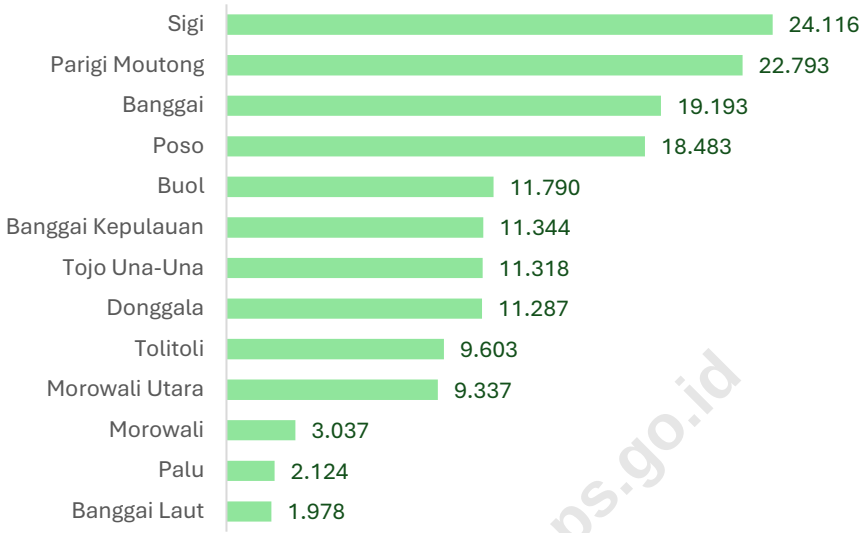

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Provinsi Sulawesi Tengah Tahap 1

Gambar 2.9 Jumlah Petani Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Subsektor Tanaman Pangan, 2023

https://sulteng.bps.go.id

C. Ketersediaan dan Konsumsi Beras Sulawesi Tengah

C.1 Ketersediaan Beras

Ketersediaan beras merupakan aspek penting dalam pembangunan ketahanan pangan nasional, sehingga ketersediaannya perlu untuk diperhatikan. Ketersediaan beras tidak dapat dipisahkan dari gabah kering giling yang dihasilkan. Semakin besar gabah kering giling, maka semakin besar pula ketersediaan beras. Selama tahun 2023 produksi beras yang dihasilkan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 484.836 ton. Produksi beras tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dan Bulan Mei. Puncak panen sejak tahun-tahun sebelumnya berkisar pada bulan-bulan yang sama.

Ketersediaan beras di Sulawesi Tengah pada tahun 2023 meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 produksi beras secara tahunan hanya sebesar 439.409 ton.

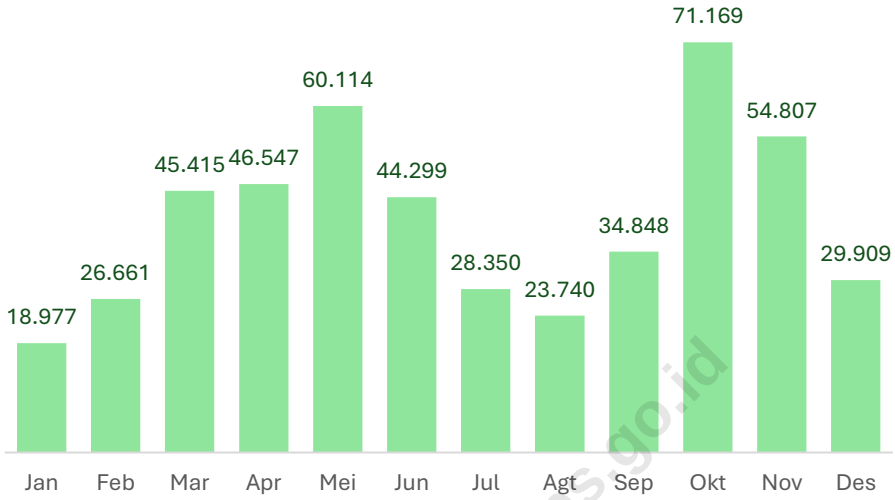

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.10 Produksi Beras di Sulawesi Tengah Januari—Desember (ton), 2023

https://sulteng.bps.go.id

Berdasarkan peta persebaran produksi beras di kabupaten/kota Sulawesi Tengah tahun 2023 (Gamba 2.11) sejalan dengan luas panen nya, Kabupaten Parigi Moutong menjadi penyumbang produksi beras tertinggi yaitu sebesar 148.006 ton beras selama setahun. Artinya Kabupaten Parigi Moutong berkontribusi sebesar 30,53 persen produksi beras di Sulawesi Tengah. Daerah berikutnya yang kontribusi juga masih relatif tinggi yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Poso berturut-turut total produksi berasnya adalah 105.517 ton, 56.051 ton, dan 55.515 ton. Sedangkan wilayah dengan produksi beras sedang terdapat 5 kabupaten yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Buol. Sedangkan yang produksi beras nya rendah adalah Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kota Palu yang produksi berasnya dibawah 5.000 ton per tahun. Kabupaten Tojo Una-Una merupakan wilayah yang juga dikenal dengan produksi jagungnya, demikian pula dengan Kabupaten Banggai Kepulauan serta Banggai Laut yang lebih terkenal dengan produksi Ubi Banggai.

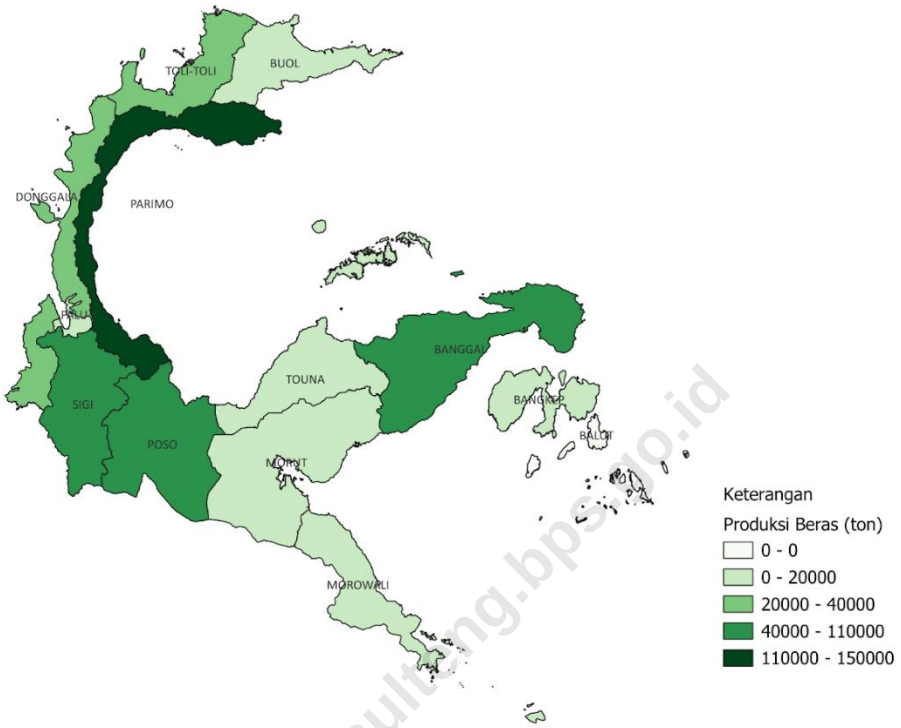

Sumber: BPS (diolah)
Gambar 2.11 Produksi Beras Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (ton), 2023

https://sulteng.bps.go.id

Pada Tahun 2020, BPS menyelenggarakan Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA). Dari hasil pendataan tersebut didapatkan data jumlah penggilingan padi di Sulawesi Tengah sebanyak 1.937 dengan rincian 1.799 skala kecil, 136 skala menengah, dan 2 skala besar. Pada skala kecil kapasitas penggilingan dapat menghasilkan maksimal 1,5 ton per hari, di skala menengah menghasilkan 1,5-3 ton per hari, dan di skala besar dapat menghasilkan 3 ton per hari.

Kegiatan PIPA 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah mencatat 59,37 persen usaha/perusahaan penggilingan padi memiliki stok gabah atau beras. Jumlah usaha/perusahaan penggilingan padi yang memiliki stok gabah atau beras, yang terbanyak terdapat di Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Poso. Usaha skala kecil yang merupakan populasi terbesar usaha penggilingan padi di Provinsi Sulawesi Tengah umumnya melakukan kegiatan usahanya secara tradisional. Salah satu ciri usaha yang dijalankan

secara tradisional adalah tidak dilakukannya pencatatan operasional usaha, bahkan untuk pencatatan produksi juga tidak dilakukan.

Dengan banyaknya tempat penggilingan padi ini diharapkan mampu menampung lebih banyak lagi produksi padi yang bisa dihasilkan oleh para petani. Banyaknya penggilingan padi apabila dibandingkan dengan produksi beras saat ini sudah sangat mencukupi. Meskipun skala penggilingan padi masih lebih banyak pada usaha kecil. Peningkatan ataupun dorongan untuk menambah usaha penggilingan padi skala besar di setiap wilayah atau kabupaten perlu untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong produktivitas produksi beras di berbagai wilayah.

Faktor banyaknya penggilingan padi dan produktivitas padi dapat menimbulkan efek simultan. Selain mendorong adanya penggilingan padi skala besar di setiap wilayah, perlu untuk terus menjaga eksistensi dari usaha-usaha penggilingan padi skala kecil. Usaha padi skala kecil yang tidak memiliki pencatatan hasil usaha berpeluang untuk terus berkembang apalagi mengingat produksi padi yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah usaha penggilingan padi skala kecil. Usaha untuk meningkatkan produktivitas padi diharapkan mampu mendorong keberhasilan usaha-usaha penggilingan padi skala kecil.

https://sulteng.bps.go.id

Tabel 2.1 Jumlah Usaha Penggilingan Padi Menurut Skala Penggilingan dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA), 2020

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Penggilingan Kecil	Penggilingan Menengah	Penggilingan Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Morowali	12	12	–	–
Banggai Laut	263	259	4	–
Donggala	71	67	4	–
Toli-Toli	289	279	10	–
Parigi Moutong	181	117	64	–
Banggai Kepulauan	228	221	6	1
Buol	109	109	–	–
Banggai	342	318	23	1
Tojo Una-Una	25	18	7	–
Poso	315	306	9	–
Morowali Utara	–	–	–	–
Kota Palu	100	91	9	–
Sigi	2	2	–	–
Sulawesi Tengah	**1.937**	**1.799**	**135**	**2**

Sumber: BPS, Direktori Usaha/Perusahaan Industri Penggilingan Padi 2020 Buku 19: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo

https://sulteng.bps.go.id

C.2 Kebutuhan Konsumsi Beras

Kebutuhan konsumsi beras merupakan salah satu aspek penting untuk mengukur seberapa besar jumlah beras yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Kondisi ini menyebabkan angka kebutuhan konsumsi beras tidak dapat dipisahkan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk akan selaras dengan pertumbuhan konsumsi berasnya.

Kebutuhan konsumsi beras antar wilayah di Sulawesi Tengah digambarkan melalui peta tematik (Gambar 2.12). Melalui peta tersebut tampak bahwa selain produksinya yang tinggi ternyata Kabupaten Parigi Moutong juga konsumsinya paling tinggi karena jumlah penduduknya yang juga besar.

Sedangkan Kota Palu yang merupakan daerah perkotaan sehingga produksi padi nya rendah, namun kebutuhan konsumsi berasnya tinggi. Untuk Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Buol meskipun produksinya kecil, kebutuhan konsumsinya juga kecil. Berikutnya pada pembahasan selanjutnya akan lebih diperdalam kecukupan produksi beras wilayah kabupaten/kota terhadap perkiraan konsumsinya.

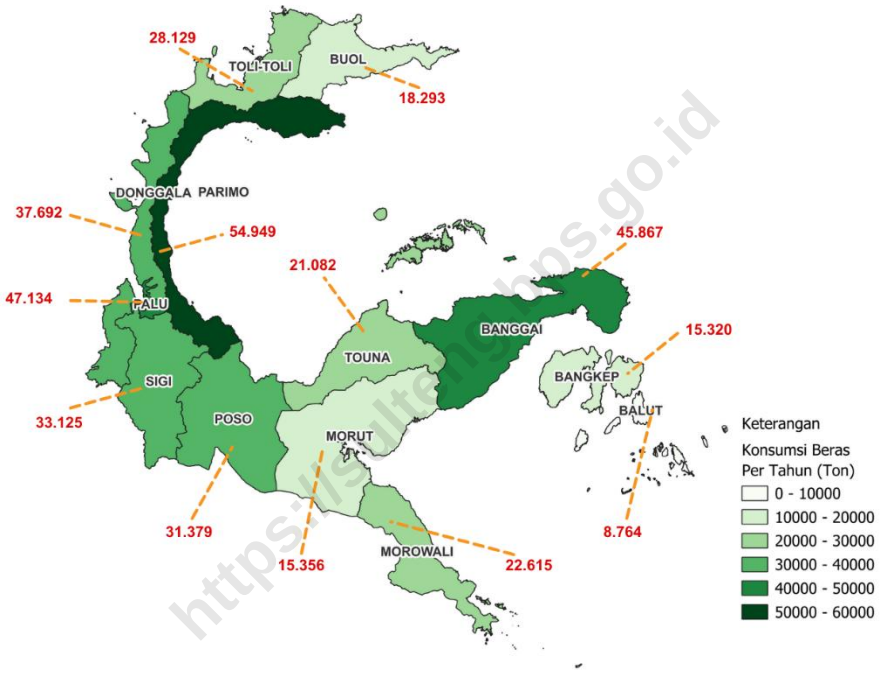

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.12 Konsumsi Beras Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (ton), 2023

D. Kecukupan dan Pemenuhan Kebutuhan Beras Antar Wilayah

D.1 Kecukupan Beras

Kecukupan beras dapat dilihat melalui surplus dan defisit beras yang ada. Suatu kabupaten/kota dikatakan surplus beras apabila ketersediaan beras melebihi kebutuhan konsumsi beras, sedangkan dikatakan defisit beras apabila ketersediaan beras lebih rendah dari kebutuhan konsumsi beras. Perhitungan surplus dan defisit beras dilakukan dengan asumsi bahwa

setiap kabupaten/kota menghasilkan beras untuk dikonsumsi seluruhnya oleh penduduk di kabupaten/kota tersebut.

Gambar 2.13. menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Pada tahun 2023 secara agregat diperkirakan produksi beras Sulawesi Tengah mengalami surplus sebesar 105.040 ton. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 7 kabupaten/kota yang mengalami defisit dan 6 kabupaten tersisa mengalami surplus. Distribusi wilayah yang mengalami surplus dan defisit pun beragam. Kabupaten yang mengalami defisit di bagian utara ada Kabupaten Buol, di bagian barat ada Kota Palu dan Kabupaten Donggala, di bagian tengah ada Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali, dan di bagian Timur ada Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Defisit beras di bagian kabupaten-kabupaten yang berada di kepulauan dan perkotaan didukung oleh kurangnya lahan pertanian padi di wilayah tersebut. Selain itu, di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut terdapat sumber karbohidrat lain yang juga menjadi andalan bagi pertanian tanaman pangan nya selain padi.

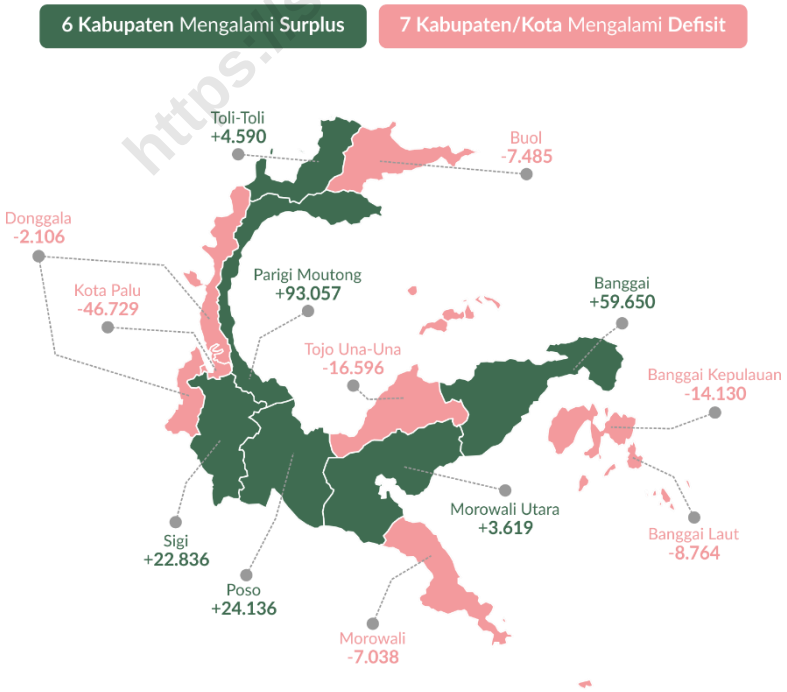

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.13 Surplus dan Defisit Beras Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (ton), 2023

Kabupaten Parigi Moutong selain menjadi penghasil produksi beras tertinggi ternyata juga menjadi wilayah dengan surplus beras tertinggi dengan jumlah sebesar 93.057 ton. Dengan surplus beras ini Parigi Moutong dapat mencukupi kebutuhan konsumsi beras penduduknya dengan produksi dalam wilayahnya. Selain itu, dengan adanya surplus diharapkan pula cadangan surplus bisa didistribusikan untuk berbagai wilayah yang mengalami defisit. Jika dilihat dari letak geografisnya Parigi Moutong berada di sebelah utara dan barat Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk wilayah selatan dan timur Sulawesi Tengah terdapat Kabupaten Banggai yang juga mengalami surplus beras relatif tinggi yakni sebesar 59.650 ton. Sehingga untuk distribusi surplus dan defisit yang beragam ini diharapkan mampu diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan beras dalam provinsi dengan distribusi antar wilayah di dalam provinsi.

Peta persebaran distribusi beras digunakan untuk mengetahui distribusi tingkat ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kabupaten/kota dengan tingkat kebutuhan konsumsi beras tinggi, namun memiliki tingkat ketersediaan beras rendah. Selain itu terdapat kabupaten/kota dengan tingkat kebutuhan konsumsi rendah, namun memiliki tingkat ketersediaan beras tinggi. Ketimpangan ini dapat menimbulkan defisit beras di wilayah tersebut. Kota Palu memiliki tingkat kebutuhan konsumsi beras yang tinggi, namun tingkat ketersediaan beras yang rendah. Kondisi ini menyebabkan Kota Palu mengalami defisit beras tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, hal ini seharusnya hal ini tidak menjadi masalah besar mengingat Kota Palu adalah wilayah perkotaan yang bukan merupakan sentra pertanian. Defisit yang terjadi bisa tertutupi dengan distribusi yang tepat dari wilayah-wilayah penyangganya yang kebanyakan adalah wilayah surplus beras seperti Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi. Sedangkan Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi adalah wilayah yang surplus karena dengan hasil produksinya yang relatif menengah sudah mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya yang juga menengah. Oleh karena itu, surplus kedua wilayah ini bisa turut membantu defisit yang terjadi di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una maupun Kabupaten Morowali. Sedangkan untuk pemenuhan defisit Kabupaten Donggala dapat didistribusikan melalui surplus Kabupaten Parigi Moutong dan defisit Kabupaten Buol dapat didukung oleh hasil produksi Kabupaten Toli-Toli.

https://sulteng.bps.go.id

Namun, tentu saja hal ini tentu saja perlu untuk dapat dikaji lebih mendalam lagi dengan kajian kebutuhan konsumsi beras berdasarkan konsumsi per kapita penduduk setiap wilayah kabupaten/kota. Serta dengan memperhatikan tingkat kebutuhan beras dibandingkan kebutuhan terhadap karbohidrat lain bagi masyarakat wilayahnya.

D.1 Ketahanan Pangan di Masa Depan

Ketika populasi penduduk terus bertambah, dibutuhkan lebih banyak upaya dan inovasi untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan. Lahan, tanah yang sehat, air, dan sumber daya genetik tanaman merupakan masukan utama dalam produksi pangan. Perlunya mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan, meningkatkan hasil panen pada lahan pertanian yang ada tanpa pembukaan hutan yang signifikan. Diperlukan juga pengelolaan air secara bijaksana melalui peningkatan teknologi irigasi dan penyimpanan, terakhir dikombinasikan dengan pengembangan varietas tanaman baru yang lebih produktif.

Membangun ketahanan sistem pangan lokal sangatlah penting untuk mencegah kekurangan pangan dalam skala besar di masa depan dan untuk memastikan ketahanan pangan bagi semua orang.

https://sulteng.bps.go.id

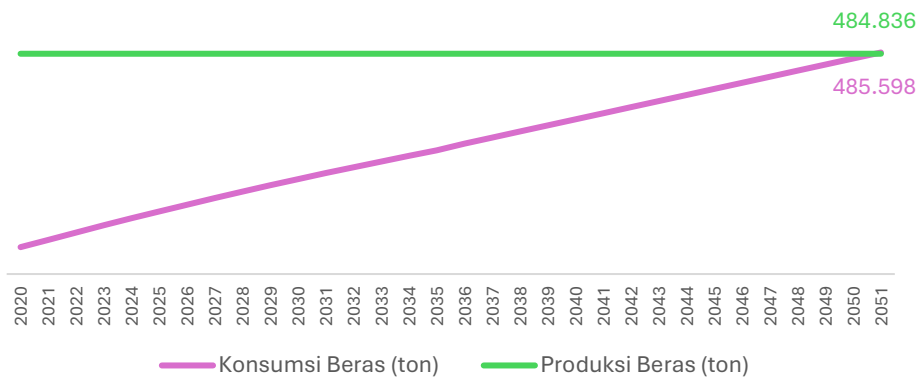

Sumber: BPS (diolah)

Catatan: Konsumsi per kapita dan produksi beras dianggap konstan menurut data 2023. Konsumsi beras diperoleh dari perkalian konsumsi per kapita dengan jumlah penduduk hasil LFSP 2020 dan proyeksi LFSP 2020

Gambar 2.14 Perkiraan Produksi dan Konsumsi Beras Sulawesi Tengah, 2020—2051

Melalui Gambar 2.14 disajikan perkiraan kapan produksi beras dan konsumsi beras Provinsi Sulawesi Tengah akan mengalami defisit. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada tahun 2023 secara agregat produksi beras Sulawesi Tengah diperkirakan mengalami surplus sebesar 105.040 ton. Dengan asumsi produksi beras tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2023 dengan mempertimbangkan perkalian antara konsumsi per kapita penduduk secara konstan dikali jumlah penduduk hasil proyeksi LF SP2020 maka defisit beras diperkirakan akan terjadi pada tahun 2051. Upaya untuk terus menjaga kemampuan lokal untuk swasembada beras guna memenuhi kebutuhan masyarakat perlu dilakukan apalagi jika kembali melihat tren produksi padi yang telah dipaparkan sebelumnya juga mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Selain faktor tenaga kerja maupun produktivitas nyatanya tantangan lain berkaitan dengan alam dan eksternal juga perlu mendapatkan konsentrasi untuk ditemukan solusinya. Seperti pada beberapa tahun terakhir adanya perubahan cuaca ekstrem yang mengakibatkan petani mengalami gagal panen maupun tingginya harga pupuk yang tidak terkendali menyebabkan petani kesulitan untuk menghasilkan produksi padi yang optimal.

Potensi pertanian di Sulawesi Tengah sebagaimana telah dilakukan pembahasan sebelumnya menjadi sangat vital mengingat letak wilayah geografis yang berada di pusat Pulau Sulawesi dan jarak dengan ibu kota negara (IKN) yang dekat. Upaya menggenjot pertanian padi dapat dilaksanakan tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan beras dalam provinsi. Melainkan juga diberikan perhatian terhadap penguatan ketahanan pangan wilayah lain di dalam negeri. Sulawesi Tengah dapat berkembang menjadi wilayah sentra untuk pemenuhan impor antar wilayah di dalam negeri.

https://sulteng.bps.go.id

D.2 Pemenuhan Kebutuhan Beras Antar Wilayah

Kebutuhan konsumsi beras tidak serta merta dapat tercukupi di awal tahun 2023. Hal ini terlihat dari defisit beras yang terjadi di Bulan Januari dan Februari 2023. Defisit beras di kedua bulan tersebut terjadi karena kebutuhan konsumsi beras lebih besar dibandingkan ketersediaan beras. Hal ini diakibatkan pada bulan Januari dan Februari, panen padi belum

terjadi, sehingga ketersediaan menjadi sangat kecil. Provinsi Sulawesi Tengah tetap memiliki kabupaten-kabupaten yang mengalami surplus beras, namun lebih didominasi oleh kabupaten/kota dengan defisit beras. Defisit beras juga terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan Desember tahun 2023.

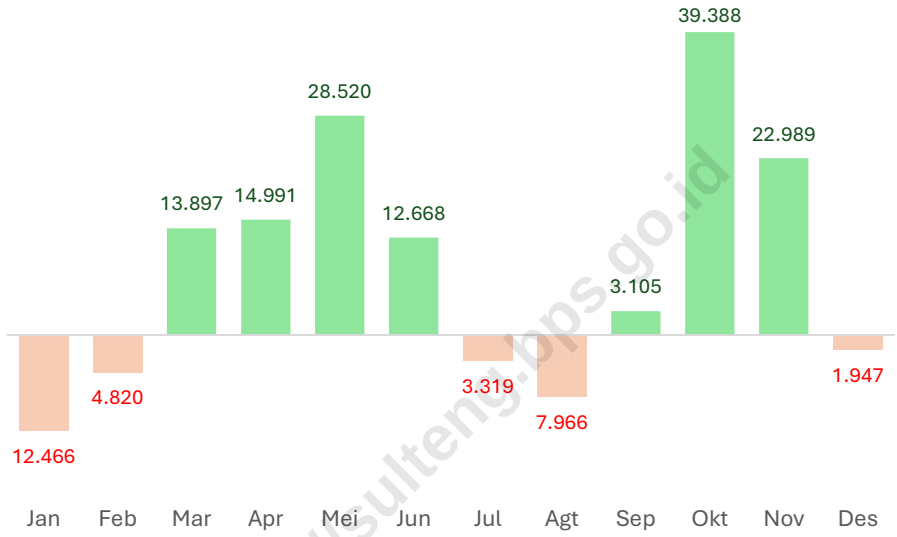

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.15 Surplus-Defisit Beras Sulawesi Tengah per Bulan (ton), 2023

https://sulteng.bps.go.id

Grafik di atas menunjukkan adanya fluktuasi surplus dan defisit beras di Provinsi Sulawesi Tengah. Surplus terbesar terjadi di bulan Oktober, yang menandakan adanya masa panen padi di bulan tersebut. Grafik menunjukkan bahwa defisit beras terjadi di bulan Januari, Februari, Juli, Agustus, dan Desember. Defisit yang terjadi pada bulan-bulan tersebut dapat dipenuhi dari bulan–bulan surplus sebab secara agregat surplus lebih banyak dibanding defisit. Defisit beras yang terjadi di bulan Januari dan Februari dipenuhi melalui stok yang masih ada pada tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 secara agregat setahun Sulawesi Tengah mengalami surplus beras sebesar 59.613 ton.

Defisit yang terjadi di bulan Januari dan Februari sebesar 17.286 ton. Apabila ditinjau lebih spesifik wilayah yang tidak mengalami defisit sepanjang tahun terdapat 3 kabupaten yaitu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi. Pada kurun waktu awal tahun bulan Januari dan Februari juga hanya 3 kabupaten ini yang tidak mengalami defisit. Surplus

yang diperoleh melalui ketiga wilayah tersebut berpotensi untuk membantu defisit wilayah-wilayah lainnya. Namun, apabila hanya mengandalkan surplus pada bulan berjalan tersebut tentu belum mampu untuk menutupi seluruh defisit di kabupaten lainnya. Sehingga sangat diperlukan untuk menggerakkan kebijakan cadangan beras pada tahun sebelumnya. Mengingat pada tahun 2022 secara agregat tahunan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami surplus produksi beras. Surplus beras yang ada akan didistribusikan melalui Badan Pusat Logistik (BULOG). BULOG memiliki peran penting dalam mengendalikan ketersediaan dan distribusi pangan, melalui pengadaan, pengolahan, pemerataan stok antar wilayah, sesuai kebutuhan, dan distribusi pangan (Perpres RI No. 48 Tahun 2016). Salah satu peran BULOG sebagai pengendali distribusi pangan, termasuk beras, tidak dapat terlepas dari mata rantai pasok perdagangan beras. Semakin panjang rantai pasok, maka harga jual beras akan semakin tinggi, tanpa distribusi beras dari wilayah lain. Hal ini seharusnya mendorong terjadinya distribusi beras antar wilayah di awal tahun 2023.

Cadangan pangan diatur dalam UU No 18/2012 tentang Pangan. Dalam UU ini dijelaskan, cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah pusat dan daerah. Adapun cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola pemerintah dalam hal ini Bulog. Dengan demikian, pemahaman cadangan beras nasional (CBN) terdiri dari cadangan beras masyarakat (CBM) dan cadangan beras pemerintah (CBP). Sementara CBM terdiri dari cadangan beras lini 1, berupa cadangan yang berada di rumah tangga konsumen yang siap dikonsumsi. Kemudian, cadangan lini 2 yang berada di pedagang pengecer, grosir, dan pedagang besar yang siap melayani permintaan konsumen. Selanjutnya, cadangan lini 3, yaitu yang berada di penggilingan, yang siap melayani permintaan para pedagang. Persediaan di petani dan pedagang pengumpul dalam bentuk gabah dimasukkan pada persediaan lini 3. Yang penting lagi ialah cadangan lini 4, yakni padi yang sedang dan akan panen dalam waktu 1-2 bulan lagi. Untuk diketahui, antara CBM dan CBP merupakan ”satu mata rantai sistem logistik” dari jutaan petani ke jutaan rumah tangga konsumen. Alirannya kontinu setiap hari karena harus ada nasi di meja makan untuk pagi, siang, dan sore. (Gafar, 2023).

https://sulteng.bps.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras pada tahun 2023, meskipun terdapat beberapa wilayah yang masih mengalami defisit beras. Namun, jika ditinjau dari geografisnya persebaran wilayah yang mengalami defisit dan surplus beras variatif, sehingga dapat diupayakan untuk pendistribusian antar wilayah tersebut.

E. Fenomena Terkait Produksi Padi dan Beras Sulawesi Tengah

E.1 Inflasi Beras

Daerah dengan sektor pertanian yang kuat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, sehingga tidak terlalu terpengaruh fluktuasi harga pangan dan ketidakpastian pasokan dari daerah maupun negara lain, bahkan ketika situasi darurat atau krisis internasional. Kestabilan harga pangan sangat erat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ketika harga pangan lebih stabil seluruh lapisan masyarakat diharapkan lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

https://sulteng.bps.go.id

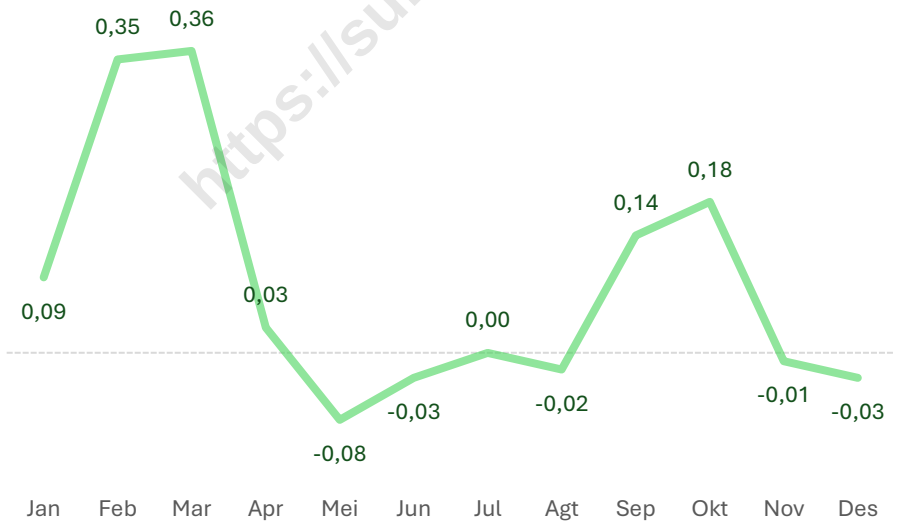

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.16 Andil Inflasi Beras Bulanan Sulawesi Tengah (persen), 2023

Andil Inflasi adalah besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional. Pada gambar di atas terlihat bahwa andil inflasi beras sangat fluktuatif. Dimana andil inflasi lebih sering terjadi apabila

dibandingkan terhadap andil deflasi. Andil inflasi tertinggi pada Bulan Februari-Maret dimana pada bulan-bulan ini produksi beras mulai meningkat dibanding awal tahun namun belum mencapai puncak panen. Apabila dibandingkan dengan Gambar 2.15. terlihat bahwa pada Bulan Februari dengan asumsi tanpa mempertimbangkan cadangan beras yang ada, ketersediaan beras masih mengalami defisit. Inflasi mulai melandai pada kisaran -0.01 hingga 0.01 pada Bulan April-Agustus karena panen raya Bulan Mei sudah ada dan ketersediaan beras mulai mengalami surplus. Pada Bulan Agustus ketika ketersediaan beras defisit, inflasi beras pun mulai naik kembali di Bulan September dan Oktober. Grafik mulai melandai di Bulan November dan Desember dengan adanya kontribusi panen raya di Bulan Oktober.

Ketidakelastisan produksi dari suatu bahan makanan di suatu negeri, yakni laju pertumbuhan dari produksi bahan makanan (termasuk beras) menjadi lambat daripada laju pertumbuhan penduduk serta pendapatan perkapitanya, dengan demikian mengakibatkan harga suatu bahan makanan akan meningkat melebihi peningkatan harga barang lainnya (Farizi dan Kornitasari, 2023). Menurut Ananda (2015) menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan sendiri dapat dilihat dari sisi supply, iklim dan cuaca yang sulit diprediksi berdampak pada produksi pangan. Gagal panen karena faktor cuaca, serangan hama, dan bencana alam memberikan dampak pada produksi pangannya berkurang dengan demikian akan menipisnya supply pangan juga membawa dampak dengan melambung harga pangannya. Beberapa penelitian mengaitkan hubungan antara inflasi dengan tingkat produksi maupun stok. Oleh karena itu, perhatian lebih terhadap perhitungan jitu terhadap cadangan stok beras maupun distribusi beras antar wilayah perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi. Memastikan cadangan persediaan beras cukup sebaiknya dilakukan untuk mengatasi tingginya permintaan pada saat musim libur lebaran atau untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen karena musim hujan, bencana alam dan juga terhambatnya proses distribusi.

https://sultengprov.go.id

E.2 Irigasi

Irigasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketahanan pangan. Irigasi yang tepat efisien meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan menyediakan air secara konsisten dan memadai, sehingga mengurangi risiko kegagalan panen dan meningkatkan pendapatan petani. Irigasi membantu mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, seperti kekeringan yang berkepanjangan, dengan sistem irigasi yang baik, lahan pertanian dapat tetap produktif meskipun kondisi cuaca tidak mendukung. Investasi dalam infrastruktur irigasi dan teknologi yang inovatif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
b. daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan
c. daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Daerah irigasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini berupa daerah irigasi yang sudah dibangun oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jenisnya meliputi:

a. irigasi permukaan;
b. irigasi rawa;
c. irigasi air bawah tanah;
d. irigasi pompa; dan
e. irigasi tambak.

Berikut adalah daftar daerah irigasi permukaan di Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat diakses melalui dashboard infrastruktur Kementerian PUPR

https://sulteng.bps.go.id

Tabel 2.2 Daftar Irigasi Permukaan di Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Daerah Irigasi	Lokasi
(1)	(2)
Daerah Irigasi Gumbasa	Kabupaten Sigi
Daerah Irigasi Lambunu	Kabupaten Parigi Moutong
Daerah Irigasi Sausu Atas	Kabupaten Parigi Moutong
Daerah Irigasi Karaopa	Kabupaten Morowali
Daerah Irigasi Mentawa	Kabupaten Banggai
Daerah Irigasi Singkoyo	Kabupaten Banggai

Sumber: *https://sigi.pu.go.id/astv2/*

Hasil analisis regresi *cobb-douglas* menunjukkan bahwa secara simultan, luas lahan, benih, urea, phonsca, tenaga kerja, pestisida, umur petani, pendidikan petani, pengalaman petani, frekuensi petani dan irigasi berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani padi sawah di Desa Sidera, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (Muzdalifah, 2014). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan frekuensi pengairan untuk optimalisasi pertumbuhan dan produksi pada tanaman padi memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman dan berat gabah kering. (Ezward, Efendi, dan Makmun, 2018). Produksi usaha tani padi sawah dipengaruhi oleh luas lahan, penggunaan benih, penggunaan pupuk urea, pupuk phonska, pestisida, total tenaga kerja, usia petani, frekuensi bimbingan petani dan Irigasi. Dimana irigasi dapat meningkatkan produksi usaha tani padi sawah sebesar 3,98%. (Damayanti, 2013)

Akses ke air irigasi yang dapat diandalkan membuat para petani memiliki teknologi baru dan mengintensifkan pengolahan tanah, yang mengarahkan pada peningkatan produktivitas, produksi keseluruhan yang lebih tinggi, dan pendapatan yang lebih besar dari pertanian. Hal ini juga membuka kesempatan-kesempatan pekerjaan baru, baik di bidang pertanian maupun di luar pertanian, dan dapat meningkatkan pendapatan, penghidupan, dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Air irigasi dan lahan memiliki fungsi penting dalam memacu pendapatan khususnya dalam pertanian, dan dalam tatanan masyarakat pedesaan pada umumnya. Hal ini berarti produksi padi dengan kondisi irigasi meningkat secara efisiensi teknis dan secara nyata lebih memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi sawah dengan kondisi irigasi yang rusak. Usaha tani akan

https://sulteng.bps.go.id

lebih produktif dan menguntungkan jika pasokan air irigasi dapat terpenuhi. Hal ini ditunjang dengan mutu bangunan fisik irigasi yang baik untuk mendukung terciptanya fungsi-fungsi irigasi berupa penyampaian, distribusi, dan drainase yang prima. Operasi dan pemeliharaan irigasi juga harus diperbaiki karena kinerja irigasi tidak hanya ditentukan oleh mutu bangunan tetapi juga ditunjang dengan operasi dan pemeliharaan. Adanya irigasi yang berfungsi dengan baik berpotensi meningkatkan produksi petani dibandingkan dengan irigasi yang mengalami kerusakan. Selama ini rendahnya produksi petani di daerah irigasi selain terkendala tipologi lahan juga karena adanya ancaman perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen karena kekeringan atau salinitas, sehingga menyebabkan produksi yang diperoleh tidak maksimal (Damayanti, 2013).

Pembangunan irigasi beberapa tahun terakhir semakin digalangkan di Sulawesi Tengah. Tidak hanya pembangunan daerah irigasi baru melainkan juga melakukan rehabilitasi terhadap daerah-daerah irigasi yang telah ada. Adanya hal ini sangat baik dan perlu untuk semakin dikembangkan terutama dalam upaya mengupayakan distribusi merata pembangunan irigasi di setiap wilayah. Sebagaimana diterangkan melalui penelitian-penelitian di atas bahwa pasokan pengairan yang lancar berpotensi untuk meningkatkan produktivitas padi.

https://sulteng.bps.go.id

E.3 Kesejahteraan Petani

Tidak dapat dipungkiri kemajuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan yang luar biasa. Namun kesenjangan masih terus terjadi dan kemajuan yang tidak merata. Sudah bukan rahasia, misalnya dari sisi pendapatan pekerja di sektor pertanian yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pendapatan yang rendah sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga mendorong petani untuk mencari atau beralih pada pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Pada gilirannya berkurangnya jumlah petani dapat menyebabkan penurunan produksi pangan. Penurunan produksi pangan lokal dapat menyebabkan kekurangan pasokan pangan, yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan pada impor dan menyebabkan kerawanan pangan.

Sebagaimana data pada Gambar 2.17 terlihat bahwa terjadi ketimpangan antara rata-rata upah/gaji pekerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dibanding sektor-sektor lainnya dalam hal ini sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan jasa keuangan. Namun, meskipun sektor pertanian tergolong sebagai sektor dengan upah/gaji yang cukup rendah, jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian tetap menjadi sektor dengan pekerja terbanyak di Sulawesi Tengah.

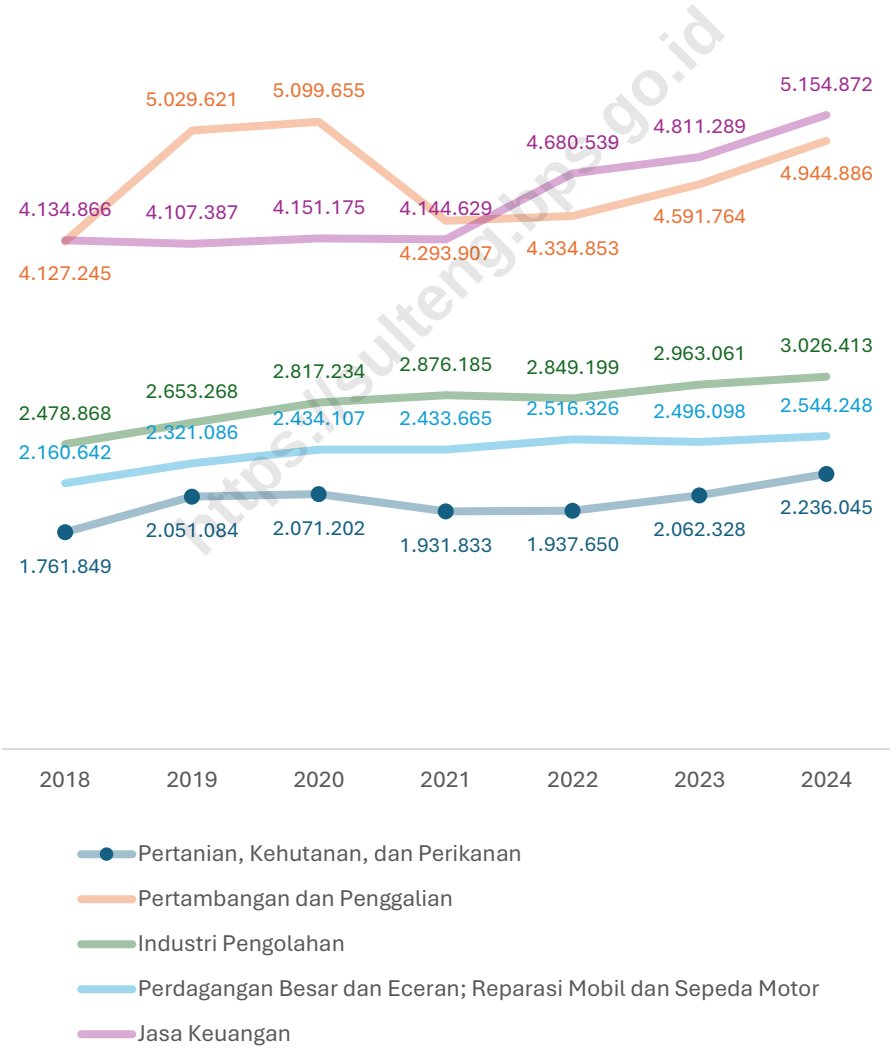

https://sulteng.bps.go.id

Sumber: *www.bps.go.id*

Gambar 2.17 Rata-Rata Upah/Gaji Indonesia (rupiah), 2018—2024

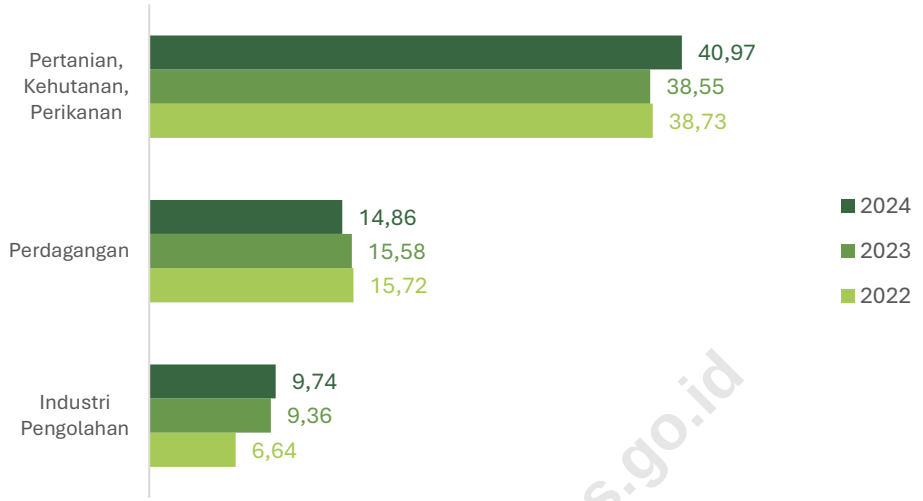

Sumber: *www.bps.go.id*

Gambar 2.18 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan utama (3 Terbesar) Provinsi Sulawesi Tengah (Februari), 2022—2024

https://sulteng.bps.go.id

Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator ukuran kesejahteraan suatu masyarakat. Pada Tabel 2.3. tergambarkan bahwa hampir di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian lebih besar dibanding penduduk yang bekerja bukan di sektor pertanian. Sehingga secara agregat Provinsi Sulawesi Tengah pun sejalan, banyak penduduk miskin berasal dari sektor pertanian dibanding sektor pekerjaan lainnya. Proporsi penduduk bekerja di sektor pertanian yang termasuk penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Sigi yaitu sebesar 57,54 persen. Padahal sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa petani di Kabupaten Sigi terbanyak di Sulawesi Tengah menurut hasil ST 2023.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/kota dan Sektor Bekerja, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja[1]	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
Banggai Kepulauan	34,89	44,28	20,83
Banggai	45,58	25,69	28,73
Morowali	54,23	18,14	27,63
Poso	44,01	34,47	21,52
Donggala	43,81	33,46	22,74
Tolitoli	47,16	36,17	16,66
Buol	51,44	26,53	22,03
Parigi Moutong	39,69	43,11	17,2
Tojo Una-Una	35,24	33,21	31,55
Sigi	34,32	57,54	8,14
Banggai Laut	58,65	20,64	20,71
Morowali Utara	51,09	30,8	18,11
Kota Palu	52,13	6,81	41,05
Sulawesi Tengah	43,97	34,05	21,99

Catatan: [1]Termasuk Pengangguran dan Bukan Angkatan Kerja

Sumber: *www.bps.go.id*, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023

https://sulteng.bps.go.id

Gambar 2.19. menyajikan Posisi Pinjaman yang Diberikan Pada Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data tersebut tergambarkan bahwa selama lima tahun terakhir pinjaman di Sektor Pertanian masih didominasi oleh Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan di beberapa wilayah lain masih cukup rendah. Misalnya saja Kabupaten Sigi dengan jumlah petani pengelola usaha tertinggi di Sulawesi Tengah, pinjaman Kabupaten Sigi di sektor pertanian cenderung masih sangat kecil hanya menempati peringkat 3 terendah dibanding wilayah lainnya.

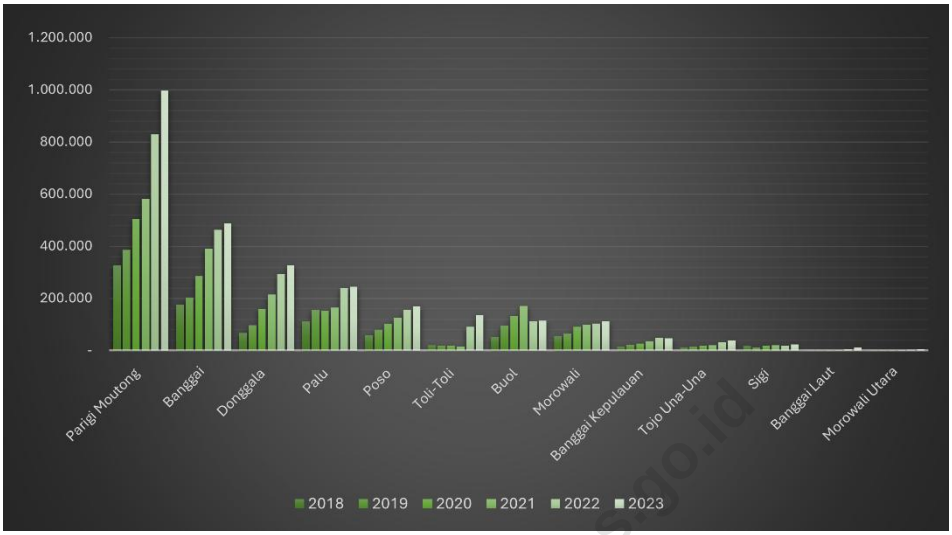

Sumber: *www.bi.go.id*

Gambar 2.19 Posisi Pinjaman yang Diberikan Pada Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (juta rupiah), 2018—2023

https://sulteng.bps.go.id

NTP merupakan hubungan antara hasil yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibeli petani. Dengan kata lain NTP merupakan alat ukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian (Hendayana, 2001).

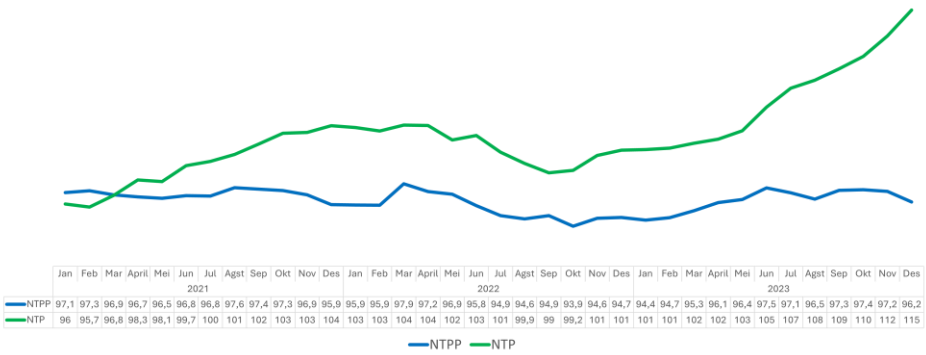

	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
	2021												2022												2023											
NTPP	97,1	97,3	96,9	96,7	96,5	96,8	96,8	97,6	97,4	97,3	96,9	95,9	95,9	95,9	97,9	97,2	96,9	95,8	94,9	94,6	94,9	93,9	94,6	94,7	94,4	94,7	95,3	96,1	96,4	97,5	97,1	96,5	97,3	97,4	97,2	96,2
NTP	96	95,7	96,8	98,3	98,1	99,7	100	101	102	103	103	104	103	103	104	104	102	103	101	99,9	99	99,2	101	101	101	101	102	102	103	105	107	108	109	110	112	115

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Berita Resmi Statistik Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah

Gambar 2.20 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Sulawesi Tengah, 2021—2023

Nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) Sulawesi Tengah sepanjang bulan di tahun 2021 sampai 2023 posisinya selalu berada di bawah nilai tukar petani (NTP). NTPP yang berada di bawah NTP mengindikasikan adanya ketimpangan daya beli yang dialami oleh petani bidang tanaman pangan dibanding petani sektor lainnya. Dimana jika dilihat tren nya pertumbuhan NTPP juga cenderung lebih stagnan dibanding pertumbuhan NTP. Upaya untuk meningkatkan NTPP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan tenaga kerja di sektor tanaman pangan termasuk produktivitas padi di Sulawesi Tengah.

F. Kesimpulan

Sulawesi Tengah memiliki potensi yang besar terkait produksi beras. Mengingat kebutuhan beras di Sulawesi Tengah beberapa tahun terakhir dapat tercukupi melalui produksi beras dalam provinsi nya. Meskipun demikian masih terdapat pekerjaan rumah berupa pola distribusi antar wilayah maupun penghitungan cadangan beras pada masa defisit produksi. Beberapa wilayah di Sulawesi Tengah masih ada yang mengalami defisit namun hal ini dapat diupayakan teratasi dengan pemenuhan kebutuhan antar wilayah yang diukur dengan lebih baik.

Persoalan kesejahteraan di sektor pertanian untuk mencapai tujuan SDGs kedua tidak hanya bertumpu pada kemampuan 'mentas' dari permasalahan kecukupan pangan melainkan juga kesejahteraan petani. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa masih terdapat ketimpangan pendapatan pekerja pertanian dibanding sektor perekonomian lainnya. Menyelesaikan permasalahan kesejahteraan bukan sekedar menaikkan angka agregat suatu wilayah terbebas dari nilai-nilai indikator pra sejahtera. Lebih besar daripada itu mengentaskan ketimpangan dan memperkecil jarak strata ekonomi setiap pekerja adalah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak.

https://sulteng.bps.go.id

G. Daftar Pustaka

BPS. (2021). *Direktori Usaha/Perusahaan Industri Penggilingan Padi 2020 Buku 19: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo*. Jakarta: BPS RI.

BPS. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu: BPS Sulawesi Tengah.

Badan Ketahanan Pangan (2014). *Pedoman Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota*. Jakarta : Kementerian Pertanian.

Damayanti, L. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, pendapatan dan kesempatan kerja pada usaha tani padi sawah di daerah irigasi parigi moutong. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 9*(2).

Ezward, C., Efendi, S., & Makmun, J. (2018). Pengaruh frekuensi irigasi terhadap pertumbuhan dan hasil padi (Oryza sativa L.). *Jurnal Agroteknologi Universitas Andalas, 1*(1), 17-24.

Farizi, R. R. & Kornitasari, Y. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Persediaan Beras Dan Harga Beras Terhadap Pembentukan Inflasi Di Provinsi Dki Jakarta. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Volume 02, Number 2, Pages 386-403. Universitas Brawijaya. http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.14.

Gafar, S. (2023, Januari 2024). Kompas [Halaman web]. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/23/surplus-beras-kecukupan-beras-dan-cadangan-beras

Hendayana, R. 2001. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

I., Muzdalifah. (2014). Pengaruh Irigasi terhadap Produksi Usaha Tani Padi Sawah di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru. *Agrotekbis*, vol. 2, no. 1, 2014.

Mulyo, J. H & Sugiyarto. (2014). *Ketahanan Pangan : Aspek dan Kinerjanya*. Dalam B.H. Sunarminto (Editor), Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional (hal. 54-55). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Perpres RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan Nasional.

https://sulteng.bps.go.id

Saifullah, A., & Sulandri, E. (2010). Prospek Beras Dunia 2010 : Akankah Kembali Bergejolak?. *Jurnal Pangan*, 19(2), 135 – 146.

Suwarno. (2010). Meningkatkan Produksi Padi Menuju Ketahanan Pangan yang Lestari. *Jurnal Pangan*, 19(3), 236

Tambunan, T. (2008). *Ketahanan Pangan di Indonesia : Inti Permasalahan dan Alternatif Solusinya*. Makalah disampaikan pada Kongres ISEI, Mataram.

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

https://sulteng.bps.go.id

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No.48 Palu 94114 (0451) 483611, 483613 Fax 483612
E-mail: bps7200@bps.go.id, website: https://sulteng.bps.go.id